Pemerintah Kabupaten
Polewali Mandar

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP



DINAS SOSIAL

Tahun 2025

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2025, Penyuusan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelola sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029.

Metode dan teknik penyusunan LAKIP ini berpedoman pada Peraturan Negara Pendayagunan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kinerja dan realisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya, Karenasegala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Polewali, 13 Januari 2026

KEPALA DINAS

H. Azwar Jasin, S. Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip :19730711 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR — *Halaman i - iii*
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN — *Halaman 1 - 11*
A. Latar Belakang
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

BAB II PERENCANAAN KERJA — *Halaman 12 - 16*
A. Rencana Strategis
B. Penetapan Kinerja Tahun 2025
C. Instrumen Pendukung Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN — *Halaman 17 - 33*
A. Akuntabilitas Kinerja
B. Analisis Efisiensi Angggaran
C. Capaian SPM Urusan Sosial
D. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP — *Halaman 34*
Kesimpulan

LAMPIRAN
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Tahun 2025
- Pohon Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025
- Laporan Monev Rencana Aksi Tahun 2025

DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan : *halaman 6*
Tabel 2.2.2. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan : *halaman 6*
Tabel 2.2.3. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan : *halaman 6*
Tabel 2.2.4. Kondisi Sarana Prasarana Kantor Dinas Sosial Tahun 2024 : *halaman 7*
Tabel 2.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 : *halaman 10*
Tabel 2.3. Program dan Alokasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2025 : *halaman 12*
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Strategis Dinas Sosial Tahun 2025 : *halaman 14*
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 tahun 2025 : *halaman 15*
Tabel 3.3. Program, Kegiatan, Sub kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2025 : *halaman 16*
Tabel 3.4 Program, Kegiatan, Sub kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun 2025 : *halaman 18*
Tabel 3.5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 tahun 2025 : *halaman 20*
Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 tahun 2023,2024 dan 2025 : *halaman 20*
Tabel 3.7. Program, Kegiatan, Sub kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2025 : *halaman 21*
Tabel 3. 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 tahun 2025 : *halaman 22*
Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 tahun 2023,2024 dan 2025 : halaman 22
Tabel 3.10. Program, Kegiatan, Sub kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun 2025 : halaman 23
Tabel 3.11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 tahun 2025 : halaman 24
Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 tahun 2023,2024 dan 2025 : halaman 24
Tabel 3.13. Program, Kegiatan, Sub kegiatan Sekretariat Dinas Tahun 2025 : halaman 25
Tabel 3.14. Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025 : halaman 26
Tabel 3.15. Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2025 : halaman 27
Tabel 3.16 Gambaran Efisiensi pada Akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial Tahun 2025 : halaman 28

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar : *halaman 8*
Grafik 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar : *halaman 10*
Gambar 2.1. Screen Shot pemanfaatan aplikasi sebagai instrument pendukung : *halaman 13*
Gambar 3.1. Penyaluran bantuan permakanan bagi lansia dan anak terlantar serta Alat Bantu Kursi Roda Disabilitas Program Rehabilitasi Sosial tahun 2025 : halaman 17
Gambar 3.2. Fasilitasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Sosialisisasi Kegiatan KUBE dan UEP Program Pemberdayaan Sosial tahun 2025 : *halaman 19*
Gambar 3.3. Penyaluran bantuan bagi korban bencana tahun 2025 : *halaman 21*
Gambar 3.4. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional tahun 2025 *halaman 24*
Gambar 3.5. Aktivitas Penyusunan Renstra dan Pelaporan Simkinerja tahun 2025 : halaman 26

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
B. KEDUDUKAN, TUGAS, POKOK DAN FUNGSI



A. LATAR BELAKANG

1. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara berkala. Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, mutlak menjadi kewajiban pemerintah dan menjadi salah satu tuntutan masyarakat era saat ini sehingga diperlukan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dapat berdampak langsung bagi kesejahteraaan masyarakat, mengedepankan prinsip bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengacu pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Melalui SAKIP ini, disusun perencanaan kinerja yang fokus pada permasalahan utama pemerintahan atau organisasi serta berorientasi pada perbaikan pencapaian sasaran kinerja yang terukur.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) mengacu pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya, maka berkaitan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan laporan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LAKIP tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dimaksudkan memberikan gambaran capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan pencapaian indikator sasaran dan program dan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran program yang telah ditetapkan pada tahun 2025

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan laporan adalah memberikan Informasi Kinerja terukur yang telah dicapai dengan mencermati berbagai kendala dan permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan dan meningkatkan kinerja ditahun berikutnya.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Laporan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029;
h. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. KEDUDUKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang sosial yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang mengamanatkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial untuk memberikan dukungan terhadap optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah kepada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan kantong-kantong kemiskinan.

B.1. Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah :

1. Optimalisasi pelayanan dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Penguatan basis data sosial (DTSEN) untuk bantuan sosial yang tepat sasaran;
3. Penyediaan sarana prasarana (rumah singgah) pendukung pelayanan sosial;
4. Penyiapan SDM terdidik dan terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial;
5. Optimalisasi pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebagai wujud penghormatan atas jasa pahlawan dan memperkuat nilai kejuangan.

B.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan sosial;
b. Pelaksanaan kebijakan sosial;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sosial;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya dan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas dan fungsi setiap susunan organisasi Dinas dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun tugas dan fungsi Satuan Kerja satu tingkat dibawah Kepala Dinas, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sekretaris Dinas

1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait
2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
   b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
   c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
   d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
   e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
   f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
   g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
   h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
   i. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
   j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;dan
   k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial.
2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan petunjuk teknis perlindungan dan jaminan sosial;

b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perlindungan dan jaminan sosial;
c. penyelenggaraan perlindungan sosial;
d. penyelenggaraan jaminan sosial;
e. penyelenggaraan koordinasi teknis perlindungan dan jaminan sosial;
f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan dan jaminan sosial; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial

1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan rehabilitasi sosial.
2) Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial;
   b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial;
   c. penyelenggaraan rehabilitasi sosial, lansia dan anak;
   d. penyelenggaraan rehabilitasi tuna sosial, disabilitas dan panti;
   e. penyelenggaraan koordinasi teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
   f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi sosial; dan
   g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin tugas menyelenggarakan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
   b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
   c. penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial;
   d. penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
   e. penyelenggaraan bantuan stimulan;

f. penyelenggaraan pemberdayaan fakir miskin;
g. penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan;
h. penyelenggaraan koordinasi teknis penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B.3. Komposisi Pegawai

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar memiliki sumber daya ASN dan Non ASN yang cukup beragam, baik dari aspek jenis kelamin, umur, Tingkat Pendidikan, Disiplin Ilmu, Pangkat dan Golongan serta pelatihan yang pernah diikuti. Jumlah sumber daya Dinas Sosial terdiri 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 2 orang Kepala Bidang, 6 orang Pejabat Fungsional, 9 orang pada Jabatan Pelaksana, 13 orang PPPK dan 4 orang Tenaga Outsorcing. Komposisi SDM Dinas Sosial digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II/JPT	1	-	1
2.	III/Pejabat Administrator	1	2	3
3.	IV/Pejabat Pengawas	1	2	3
4.	Pejabat Fungsional	4	2	6
5.	Pejabat Pelaksana	5	4	9
6.	PPPK	4	9	13
Jumlah		16	19	35

Tabel 2.2.2. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	-	-	0
2.	II	-	-	0
3.	III	11	8	19
4.	IV	2	2	4
Jumlah		13	10	23

Tabel 2.2.3. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	0
2.	SMP	-	-	0
3.	SMA	6	3	9
4.	Sarjana Muda	-	-	0
5.	Strata 1 (S1)	7	12	19
6.	Strata 2 (S2)	5	2	7
Jumlah		18	17	35

Berdasarkan kondisi sumber daya manusia Dinas Sosial sebagaimana tabel di atas terdapat kekosongan jabatan Administrator untuk segera dilakukan pengisian jabatan melalui koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepegawaian sedangkan proporsi Jabatan Fungsional belum memenuhi standar kebutuhan untuk melaksanakan tugas fungsi pelayanan Dinas Sosial sehingga dibutuhkan ketersediaan Jabatan Fungsional seperti Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial dan Pranata Komputer. Jumlah Pegawai Golongan III memiliki proporsi paling banyak pada Dinas Sosial yang mengindikasikan tingkat pendidikan ASN lebih banyak jenjang Strata Satu (S1) sehingga perlu didorong dan difasilitasi melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi untuk peningkatan kualitas kompetensi sumber daya manusia.

Ketersediaan sarana prasarana perkantoran tentunya sangat penting untuk menjamin efektifitas penyelanggaraan tugas dan fungsi Dinas. Adapun sarana dan prasarana Dinas Sosial dapat diuraikan sebagai berikut :

B.4. Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Organisasi

Tabel 2.2.4. Kondisi Sarana Prasarana Kantor Dinas Sosial Tahun 2024

No	Nama Barang/Jenis Barang	Volume	Satuan
1	Golongan Tanah meliputi :		
	-Tanah	1460	m^2
	-Tanah	1788	m^2
	-Tanah (Monumen Bangunan Bersejarah)	72	m^2
2	Golongan Peralatan dan Mesin meliputi:		
	-Mesin Border	2	Unit
	-Mesin Jahit	3	Unit
	-Timbangan Barang	30	kg
3	Alat Angkutan		
	- Kendaraan Roda Dua	3	Unit

4	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	-Meja Kerja	9	Unit
	-Kursi Tamu	2	Unit
	-Kursi Rapat	50	Unit
	-Kursi Kerja Pegawai	16	Unit
	-Meja 1/2 Biro	1	Unit
	-Meja Rapat	4	Unit
	-Kursi Besi	3	Unit
	-Lemari Kaca	1	Unit
	-Lemari Arsip	1	Unit
	-Air Conditioner	6	Unit
	-Kipas Angin	1	Unit
	-TV	1	Unit
	-Handy Talky	1	Unit
	-Printer	5	Unit
	-Laptop	26	Unit
	-P.C Unit	5	Unit
	-Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Unit
	-Layar Film/ Projector	1	Unit
	-Recorder Display Lainnya	1	Unit
	-Mesin Absensi	1	

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial, 2025

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

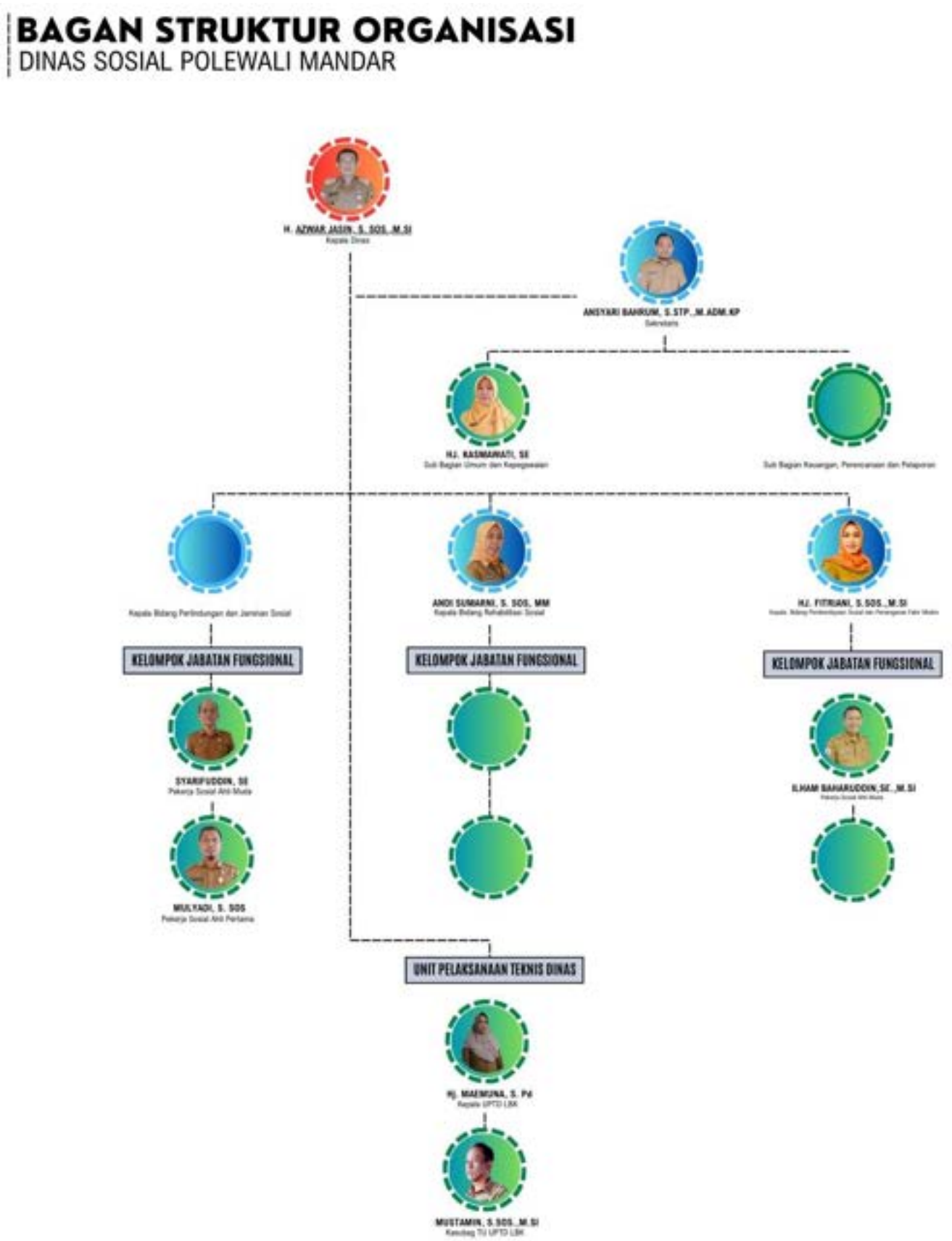

B.5. Aspek Keuangan Organisasi

Grafik 1. Stuktur Keuangan Dinas Sosial 2025



Sumber: Sekretariat Dinas Sosial, 2025

B.6. Sistematika Penyusunan LAKIP

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan LAKIP ini mengacu surat Sekretaris Daerah Nomor B-12/000.8.6.3/Org/II/2026, Tanggal 18 Februari 2026, terdiri atas 4 (Empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang memuat penjelasan singkat tentang akuntabilitas, landasan hukum, maksud dan tujuan laporan.
B. Kedudukan Tugas, Pokok dan Fungsi memuat Penjelasan umum tentang Perangkat Daerah dengan penekanan pada aspek strategis dan permasalahan utama organisasi meliputi isu strategis, tuhas dan fungsi organisasi, Kondisi sumber daya Pegawai, Sarana prasarana penunjang kinerja organisasi, Aspek keuangan dan Sistimatika Penyusunan LAKIP.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis memuat penjelasan singkat tentang Renstra, Meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama/Sasaran).
B. Penetapan Kinerja memuat Target Kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

A. Akuntabilitas Kinerja memuat perbandingan target dan realisasi kinerja , uraian keberhasilan/kegagalan serta Solusi yang dilakukan, analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan serta analisis efisiensi sumber daya (Anggaran).Penetapan Kinerja memuat Target Kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025.
B. Akuntabilitas Keuangan memuat informasi secara detail terkait akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah.

Bab IV Penutup memuat informasi secara detail terkait akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah

LAMPIRAN memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pengukuran Kinerja Tahun 2025, Realisasi Anggaran Tahun 2025, Pohon Kinerja Perangkat Daerah 2025, Laporan Monev Rencana Aksi 2025

BAB II
PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

C. INSTRUMEN PENDUKUNG 2025

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025-2029 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025–2029 serta dijadikan acuan/pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar. Rencana strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tahapan proses disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan setiap potensi maupun peluang yang ada serta hambatan yang mungkin akan timbul.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, digambarkan sebagai berikut :

Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan masa depan yang diinginkan selama 5 (lima) tahun masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Terpilih. Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar mencakup 5 (lima) pokok visi :

Sehat, Cerdas, Maju, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya, serta Berwawasan Lingkungan.

Misi adalah rumusan umum mengenai Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi. Untuk mewujudkan visi Pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar telah dirumuskan Upaya-upaya yang akan dicapai melalui 7 (tujuh) misi Pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2025-2029. Dari Tujuh misi, maka Dinas Sosial mengintervensi Misi 3 (tiga) yaitu Membangun Perekonomian yang Kreatif dan Inovatif untuk Meningktkan Kesejahteraan, serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi yang Dihadapi Masyarakat dan Misi 7 (Tujuh) yaitu Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu : *specific* (jelas), *measureable* (dapat diukur), *agreeable* (dapat disetujui), *realistic* (dapat dicapai), *time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *countinously improved* (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level outcome (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU. Tujuan dan sasaran strategis Dinas KominfoSP Tahun 2025- 2029 diuraikan sebagai berikut

Tabel 2.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	55,78	56,45	57,13	57,81	58,50	60,20	
	Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	57,69	65,38	73,08	76,92	80,77	92,31	
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana	Indeks Kepuasan Layanan	100 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang Representatif, Tertata, dan terpelihara dengan Baik	Persentase Komponen TMPN Kabupaten sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB (77,87)	BB (78,13)	BB (78,38)	BB (78,64)	A (80,90)	A (81,15)	

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk dapat melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja bertujuan antara lain untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Rumusan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2025

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2025
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	57,69%
			Meningkatnya kepuasan layanan perlindungan sosial korban bencana	Indeks kepuasan layanan perlindungan sosial korban bencana	Sangat Baik
			Meningkatnya kualitas pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang representatif, tertata, dan terpelihara dengan baik	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100%
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, maka Dinas Sosial mengagendakan Program dengan alokasi anggaran untuk tahun 2025 masing-masing dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.3. Program dan Alokasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-
	Program Rehabilitasi Sosial	Rp348.912.100
	Program Pemberdayaan Sosial	Rp218.082.800
Meningkatnya kepuasan layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana	Program Penanganan Bencana	Rp220.000.000
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang representatif, tertata, dan terpelihara dengan baik	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp89.773.900
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.071.477.753
J u m l a h		**Rp2.948.246.553**

C. INSTRUMEN PENDUKUNG 2025

Instrumen pendukung Pencapaian Kinerja Organisasi merupakan salah satu unsur yang penting dalam penerapan Akuntablitas Kinerja, hal ini berkaitan dengan pemanfaatan alat, sistem, metode, atau sumber daya (digital maupun fisik) yang digunakan untuk membantu personil dan organisasi mencapai target, meningkatkan produktivitas, serta mempermudah penyelesaian tugas secara efektif dan tepat waktu. Sebagai Upaya mewujudkan pencapaian target sasaran strategis, maka Dinas Sosial memanfaatkan instrument layanan berbasis digital melalui penggunaan beberapa system informasi sebagai berikut :

1. Pemanfaatan (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) adalah aplikasi terintegrasi milik Kemensos untuk memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara *real-time*. Penggunaannya telah diperluas sampai pada Desa/Kelurahan, dan Dinas Sosial untuk verifikasi, validasi, usulan, dan pemantauan bantuan sosial guna memastikan ketepatan sasaran penerima;

2. Pemanfaatan bersama Aplikasi Edabu (Elektronik Data Badan Usaha) BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial dalam pendaftaran penduduk yang akan diberikan jaminan kesehatan bersumber dari APBD adalah sistem berbasis web/aplikasi yang memudahkan Instansi atau badan usaha mengelola administrasi BPJS pegawai secara online, cepat, dan efisien tanpa harus ke kantor BPJS atau ke Dinas Sosial;
3. Pemanfaatan website Dinas untuk penyebarluasan informasi berfungsi sebagai pusat data digital yang cepat, efisien, dan dapat diakses oleh publik. Website Dinas meningkatkan transparansi, kredibilitas, dan jangkauan informasi, mencakup publikasi berita, profil, produk, hingga layanan Dinas Sosial;
4. Pemanfaatan layanan e-SAKIP terintegrasi guna meningkatkan kualitas SAKIP Perangkat Daerah juga upaya peningkatan kualitas Pengelolaan keuangan dan aset yang didukung ketersediaan aplikasi Simda BMD, SIPD Perencanaan dan Penganggaran, serta Peningkatan indeks kepuasan Masyarakat/stakeholder didukung melalui ketersediaan aplikasi e-Survey layanan.

Gambar 2.1. Screen Shot pemanfaatan aplikasi sebagai instrument pendukung

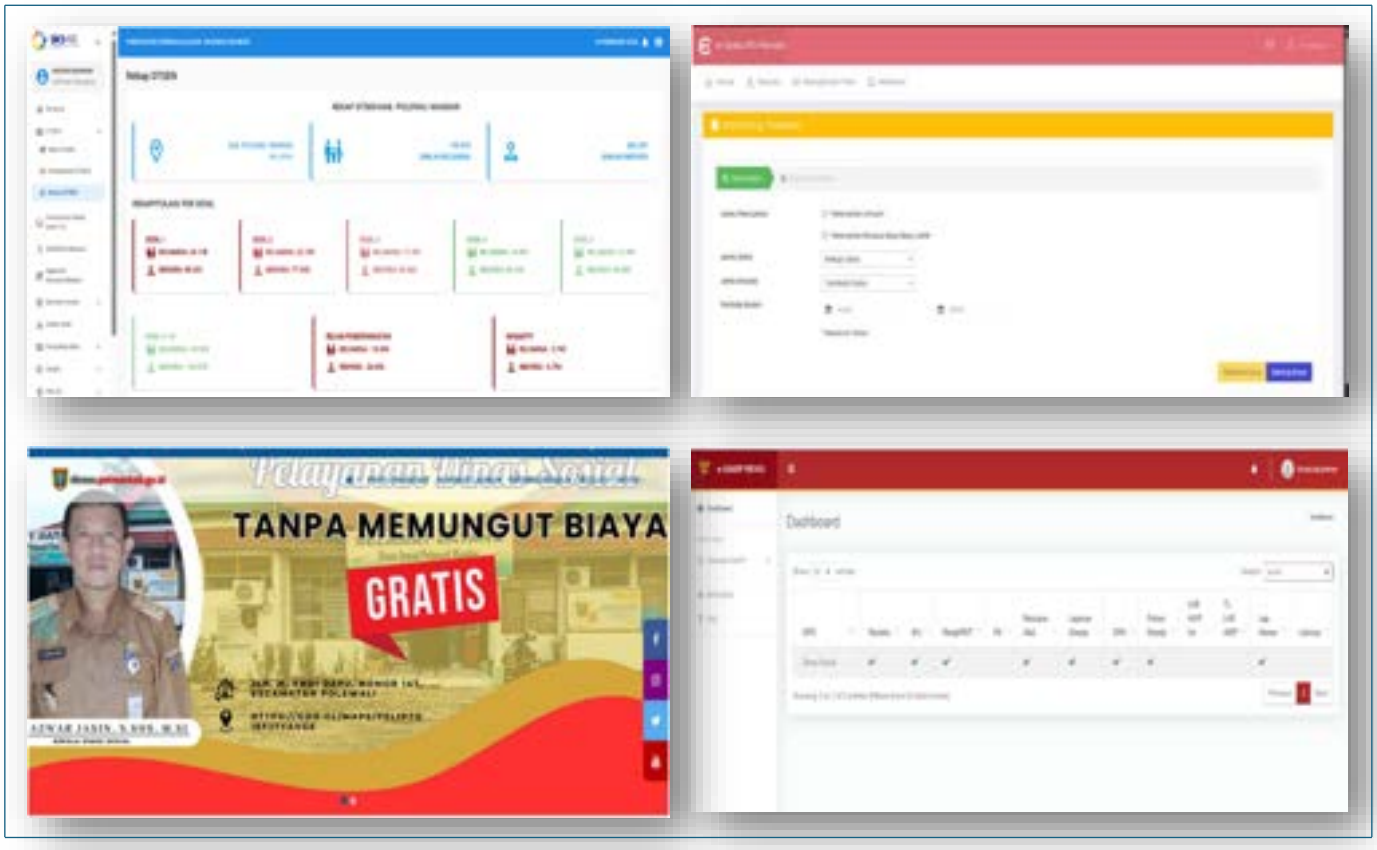

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN



A. AKUNTABILITAS KINERJA

B. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

C. CAPAIAN SPM URUSAN SOSIAL

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar selaku perangkat daerah pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada Bab ini akan diberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2025-2029 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada bagian ini juga akan diungkapkan analisis pencapaian target, kendala yang dihadapi dan Solusinya serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja..

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Strategis Dinas Sosial Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	57,69%	57,69%	100%
2	Meningkatnya kepuasan layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana	Indeks Kepuasan Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
3	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang representatif, tertata, dan terpelihara dengan baik	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelolah dengan baik	100%	100%	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100%



TUJUAN

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	57,69%	57,69%	100%

Indikator sasaran merupakan komposit dari indikator Kinerja Program. Sesuai hasil pengukuran kinerja pada sasaran strategis 1 Persentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial mampu mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu dari target 57,69 % terealisasi 57,69% sehingga tercapai 100%. Selanjutnya capaian tahun 2025 tersebut akan diperbandingkan melalui pengukuran tahun sebelumnya, namun karena terjadi perubahan penetapan Indikator sasaran sebagaimana Renstra tahun 2025-2029 maka dalam penyusunan LAKIP tahun 2025 ini tidak dapat disajikan perbandingan capaian Indikator sasaran strategis 1 mengingat terjadi perbedaan formulasi perhitungan Indikator sasaran dimaksud.

Capaian tahun 2025 tersebut dikontribusi pencapaian target program, kegiatan maupun sub kegiatan yang ada pada bidang Pemberdayaan Sosial, bidang Rehabilitasi Sosial, bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial diharapkan mampu memperkuat peran Dinas Sosial dalam mengentaskan kemiskinan hal ini merupakan amanat **SPM WAJIB** bidang sosial. Berikut diuraikan hasil analisis capaian kinerja masing-masing program tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis 1 yaitu “Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”.

1. Program dan kegiatan pada bidang Rehabilitasi Sosial bagi PPKS cukup penting mengingat program ini adalah salah satu penyumbang terbesar pencapaian SPM di Dinas Sosial dalam pelaksanaannya kegiatan difokuskan pada pemulihan, pengembangan fungsi sosial, dan pemberdayaan individu atau kelompok rentan (anak, lansia, disabilitas) agar mampu hidup mandiri dan wajar di Masyarakat. Adapun sasaran yang dilakukan intervensi penjangkauan pelayanan dan pemberian bantuan permakanan dan alat bantu pada tahun

2025 sejumlah 160 orang, terdiri dari 50 orang Lanjut Usia, 50 Anak dan 60 orang Disabilitas dengan capaian kinerja 100%.

Hambatan/Tantangan

1. Masih terbatasnya kapasitas/kompetensi pelaksana rehabilitasi;
2. Layanan Pusat Rehabilitasi di tingkat Kabupaten belum ada;
3. Ketersediaan Petugas yang berkompeten (ahli Psikologi) sangat sulit dilakukan mengingat keterbatasan anggaran;
4. Belum tersedianya data yang tervalidasi yang mencakup total jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan layanan dan rehablitasi sosial.

Solusi

1. Penyelarasan pandangan antar pelaksana/penyedia layanan dan rehabilitasi sosial tentang bagaimana pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial yang layak seharusnya dilaksanakan;
2. Penyediaan Pusat Rehabilitasi Sosial di tingkat Kabupaten yang diharapkan menjangkau Kelompok Rentan khususnya di pelayanan tingkat awal terhadap masalah sosial;
3. Penyiapan pagu anggaran untuk penyediaan tenaga ahli (psikolog)
4. Pemutakhiran data PPKS.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan bidang rehabilitasi sosial untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”, sebagai berikut :

Tabel 3.3. Program, Kegiatan, Sub kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2025

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Program Rehabilitasi Sosial	Rp348.912.000	Rp333.027.361	95.45
Kegiatan 1 : Rehsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng di luar panti sosial	Rp291.241.800	Rp275.377.001	94.55
Sub kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp291.241.800	Rp275.377.001	94.55
Kegiatan 2 : Rehsos dasar penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Rp57.670.300	Rp57.650.360	99,97
Sub kegiatan : Pemberian bimbingan sosial kepada kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Rp57.670.300	Rp57.670.300	99,97

Gambar 3.1.
Penyaluran bantuan permakanan bagi lansia dan anak terlantar serta Alat Bantu Kursi Roda Disabilitas Program Rehabilitasi Sosial tahun 2025







2. Program pemberdayaan sosial adalah program yang menyasar PPKS kategori produktif/masih bisa diberdayakan yang mengalami ketidakberdayaan akibat terganggunya fungsi sosial baik lingkungan, keterpencilan wilayah maupun karena yang bersangkutan memang tidak memiliki fasilitas yang mampu mendukung yang bersangkutan untuk bisa menjadi produktif, contohnya masyarakat terpencil yang akibat wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat ekonomi sehingga mengakibatkan kelompok masyarakat ini termarginalkan, meskipun pada dasarnya mereka memiliki potensi yang besar jika difasilitasi. Kegiatan Pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Polewali Mandar berada di Desa Taloba (Kecamatan Tutar), Desa Taramanu Tua (Kecamatan Tutar), dan Desa Puppuring (Kecamatan Alu). Tahun 2025 ditargetkan semua jiwa dalam komunitas tersebut memperoleh bantuan kegiatan pemberdayaan sedangkan bagi Keluarga miskin potensial yang diberdayakan dengan bantuan Kelompok Usaha Bersama

(KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diharapkan mampu dijalankan dengan bantuan stimulan sehingga keberlanjutan kegiatan pemberdayaan tersebut dapat efektif sehingga capaian program pemberdayaan sosial tahun 2025 mencapai 100%.

Hambatan/Tantangan

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat miskin tentang pentingnya pengelolaan Bantuan Stimulan digulirkan secara terus menerus
2. Akses ke lokasi Komunitaas Adat Terpencil (KAT) masih sangat minim baik itu akses jalan maupun akses telekomunikasi.
3. Pembinaan berkelanjutan belum dilaksanakan khususnya bagi keluarga miskin yang telah menerima bantuan stimulan.

Solusi

1. Pembinaan berupa pendampingan kepada masyarakat/keluarga miskin perihal pentingnya kemandirian secara ekonomi lebih diintensifkan.
2. Koordinasi lintas sektor terkait pemenuhan infrastruktur jalan dan telekomunikasi.
3. Peningkatan kapasitas Pekerja Sosial perlu untuk dilakukan mengingat perkembangan masalah sosial di lapangan yang semakin beragam.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan bidang pemberdayaan sosial untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”, sebagai berikut :

Tabel 3.4. Program, Kegiatan, Sub kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun 2025

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pemberdayaan Sosial	Rp218.082.800	Rp218.082.800	100
Kegiatan 1 : Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Rp27.531.900	Rp27.531.900	100
Sub kegiatan : Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Rp27.531.900	Rp27.531.900	100
Kegiatan 2 : Pengembangan Potensi Sumber Kesos Daerah Kab/Kota	Rp190.550.900	Rp190.550.900	100
Sub kegiatan : Peningkatan kemampuan potensi sumber kesos klg kewenangan kab/kota	Rp190.550.900	Rp190.550.900	100

Gambar 3.2.
Fasilitasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Sosialisisasi Kegiatan KUBE dan UEP
Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2025







SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kepuasan Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1.	Meningkatnya Kepuasan Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana	Indeks Kepuasan Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana	Sangat Baik	Sangat Baik	100%

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 tahun 2023,2024 dan 2025

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI			CAPAIAN PENINGKATAN
		2023	2024	2025	
1	Indeks Kepuasan Layanan Perlindungan Sosial Sorban Bencana	90,03%	91,74%	100%	1,11 %

Penanggulangan bencana berupa penyaluran logistik bagi korban bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, kesiapsiagaan dalam rangka tanggap darurat adalah hal mutlak, dengan pengaktifan Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah salah salah satu upayanya. Penyaluran bantuan bagi korban bencana alam merupakan langkah krusial yang harus dilakukan secara tepat, cepat, dan sesuai kebutuhan. Dengan mengetahui kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Terkait kegiatan ini pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, capaian atas Indeks kepuasan masyarakat atas layanan perlindungan sosial korban bencana adalah 100%, dimana telah menyalurkan bantuan logistik berupa sembako dan fasilitasi penampungan bagi 70 (tujuh puluh) keluarga terdampak bencana sepanjang tahun 2025, adapun jenis bencana yang terjadi adalah kebakaran, angin kencang, banjir dan tertimpa pohon dan dalam pelaksanaannya juga berkoordinasi aktif dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat dan melibatkan personil Tagana dan personil Pekerja Sosial lainnya dalam pendataan dan penyalurannya bantuan.

Berdasarkan pengukuran perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kepuasan Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terlihat terus terjadi peningkatan mencapai angka peningkatan sebesar 1,11 persen.

Hambatan/Tantangan

1. Keterbatasan dan ketidakakuratan data korban terdampak, yang menyebabkan bantuan tidak merata atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Kurangnya koordinasi antarinstansi dan relawan juga dapat menimbulkan tumpang tindih bantuan di satu wilayah, sementara wilayah lain justru belum tersentuh;
3. Gudang penyimpanan logistik bantuan bencana yang kurang layak.

Solusi

1. Pendataan dan asesmen kebutuhan masyarakat harus dilakukan secara cepat dan akurat dengan melibatkan aparat desa, relawan, dan petugas lapangan;
2. Penguatan koordinasi lintas sektor agar penyaluran bantuan berjalan efektif dan efisien dan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung proses pendataan, pemantauan distribusi, dan pelaporan secara transparan;
3. Perbaikan gudang penyimpanan logistik bencana pada kantor Dinas Sosial.

Adapun sejumlah program dan kegiatan yang diselenggarakan bidang perlindungan dan jaminan sosial untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran “Meningkatnya Kepuasan Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana”, sebagai berikut :

Tabel 3.7. Program, Kegiatan, Sub kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2025

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Program Penanganan Bencana	Rp220.082.800	Rp208.820.300	94,92
Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp220.082.800	Rp208.820.300	94,92
Sub kegiatan : Penyediaan Makanan	Rp220.082.800	Rp208.820.300	94,92

Gambar 3.3.. Penyaluran bantuan bagi korban bencana tahun 2025







SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Representatif, Tertata, dan Terpelihara dengan Baik

Tabel 3. 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang representatif, tertata, dan terpelihara dengan baik	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100%	100%	100%

Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 tahun 2023,2024 dan 2025

No	Indikator Kinerja sasaran	Realisasi			Capaian Peningkatan
		2023	2024	2025	
1	Persentase taman makam Pahlawan nasional yang Terkelola dengan baik	100%	100%	100%	-

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 tahun 2014, yang berfokus pada pemeliharaan fisik (makam, taman, sarana), pelayanan ziarah, keamanan, serta edukasi nilai-nilai perjuangan. Pengelolaan bertujuan menjaga kehormatan tempat peristirahatan terakhir para pejuang, yang dikelola secara berjenjang oleh dinas sosial di tingkat pusat maupun daerah. TMP pada prinsipnya berfungsi sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan/Pejuang, sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan sebagai obyek studi dan ziarah. Sebagai implementasi dari arahan Kementerian Sosial terakit pengelolaan TMP di daerah, maka Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar secara konsisten melakukan pemeliharaan TMP yang berlokasi di Desa Rea Kecamatan Binuang, untuk tahun 2025 terdapat 82 (delapan puluh dua) makam yang dipelihara dengan melakukan pembersihan dan pengecatan pada nisan dan pemeliharaan komponen yang ada dalam TMP.

Berdasarkan pengukuran perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Representatif, Tertata, dan Terpelihara dengan Baik, Secara konsisten dari tahun 2023 s.d 2025 terlihat terus berada pada angka 100%, ini

membuktikan bahwa komitmen untuk menjaga nilai-nilai historis perjuangan pahlawan bangsa tetap terjaga.

Hambatan/Tantangan

1. Luasnya areal yang harus dipelihara pada setiap pelaksanaan upacara/peringatan hari besar;
2. Kurangnya kepedulian masyarakat sekitar dalam menjaga situs/tempat bersejarah yg berada di wilayahnya;
3. Dukungan Pemerintah Provinsi yang belum optimal dalam membantu pelestarian situs/ tempat bersejarah.

Solusi

1. Penambahan jumlah personil untuk melakukan aktivitas pemeliharaan TMP;
2. Penguatan sinergi antar stakeholder masyarakat dan Pemerintah dalam ikut menjaga kelestarian situs/tempat bersejarah terutama generasi muda tertanam sedari dini;
3. Penguatan koordinasi ke Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial untuk alokasi sumberdaya dalam pelestarian situs/ tempat bersejarah.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan bidang pemberdayaan sosial untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran “Meningkatnya kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang representatif, tertata, dan terpelihara dengan baik”, sebagai berikut :

Tabel 3.10. Program, Kegiatan, Sub kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun 2025

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp89.773.900	Rp89.761.800	99,99
Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota	Rp89.773.900	Rp89.761.800	99,99
Sub kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota	Rp89.773.900	Rp89.761.800	99,99

Gambar 3.4.. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional tahun 2025







SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100%

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 tahun 2023,2024 dan 2025

No	Indikator Kinerja sasaran	Realisasi			Capaian Peningkatan
		2023	2024	2025	
1.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	-

Implementasi akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan rangkaian aktivitas Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan reviuw oleh Inspektorat di tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar mendapat predikat BB dari Inspektorat daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Mencermati hasil perbandingan pengukuran Indikator sasaran 4 ”Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” Predikat SAKIP Dinas Sosial dari tahun 2023 sampai dengan 2025 masih berada pada Predikat BB, ini yang perlu untuk dilakukan upaya peningkatan kinerja dengan melakukan evaluasi dan perbaikan mendalam terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Dinas untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran “Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”, sebagai berikut :

Tabel 3.13. Program, Kegiatan, Sub kegiatan Sekretariat Dinas Tahun 2025

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 2.071.477.753	Rp2.003.512.072	96,72
Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp2. 244.700	Rp2.244.660	100
Sub kegiatan 1.1. : Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Rp624.700	Rp624.660	99,99
Sub kegiatan 1.2. : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp1.620.000	Rp1.620.000	100
Kegiatan 2 :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.697.708.633	Rp1.645.671.890	96,93
Sub kegiatan 2.1. : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.697.708.633	Rp1.645.671.890	96,93
Kegiatan 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp112.743.420	Rp112.348.610	99,65
Sub kegiatan 3.1. : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp28.056.000	Rp27.914.000	99,49
Sub kegiatan 3.2. : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp18.645.000	Rp18.403.500	98,70
Sub kegiatan 3.3. : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp1.278.000	Rp1.277.740	99,98
Sub kegiatan 3.4. : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp1.080.000	Rp1.080.000	100
Sub kegiatan 3.5. : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp63.684.420	Rp63.673.370	99,98
Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp218.896.000	Rp203.677.912	93,05
Sub kegiatan 4.1. : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp40.696.000	Rp28.877.912	70,96
Sub kegiatan 4.2. : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp178.200.000	Rp174.800.000	98,09
Kegiatan 5 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp39.885.000	Rp39.569.000	99,21
Sub kegiatan 5.1. :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan	Rp32.455.000	Rp32.139.000	99,03
Sub kegiatan 5.1.2. : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp7.430.000	Rp7.430.000	100

Hambatan/Tantangan

1. Masih Rendahnya kesadaran internal tentang pentingnya penerapan akuntabilitas kinerja pada setiap unit kerja;
2. Terbatasnya sarana perangkat kerja (laptop dan printer) untuk mendukung tugas-tugas perencanaan dan pelaporan kinerja.

Solusi

1. Perlu dilakukan sosialisasi tentang penerapan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan;
2. Pengadaan laptop dan printer khsusnya pada unti kerja yang melaksanakan tugas perencanaan dan pelaporan kinerja.

Gambar 3.5. Aktivitas Penyusunan Renstra dan Pelaporan Simkinerja tahun 2025





B. ANALISIS EFISENSI ANGGARAN

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target pada sasaran strategis dilakukan dengan menghitung perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase serapan anggaran yang dapat dilakukan dengan kriteria :

1. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran di bawah persentase capaian kinerja sasaran
2. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase capaian kinerja sasaran

Tabel 3.14 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan	Ket
Meningkatnya kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100	Rp566.994.800,-	Rp551.110.161	97,73	Efisien
Meningkatnya kepuasan layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana	100	Rp220.082.800	Rp208.820.300	94,42	Efisien
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang representatif, tertata, dan terpelihara dengan baik	100	Rp89.773.900	Rp208.820.300	99,99	Efisien
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100	Rp2.071.477.753	Rp2.003.512.072	96,72	Efisien
Jumlah	**100**	**Rp2. 948.246.553**	**Rp2.853.203.893**	**96,78**	**Efisien**

Mencermati tabel 3.14 di atas, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.948.246.553 dan terealisasi sebesar Rp2.853.203.893 atau 95,74%. Meskipun anggaran belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target kinerja Dinas Sosial tercapai dengan rata rata capaian 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp95.042.660 atau rata-rata 2,92%.

C. CAPAIAN SPM URUSAN SOSIAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar wajib yang harus diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018. SPM Sosial bertujuan menjamin kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, anak, lansia, tunasosial terlantar, dan korban bencana. Adapun capaian SPM bidang sosial tahun 2025 yang ditangani oleh Dinas Sosial sebagai berikut :

Tabel 3.15. Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET	REALISASI	BELUM TERLAYANI	CAPAIAN (%)	INDEKS CAPAIAN
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	108	108	-	100	93,85
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	66	66	-	100	94,17
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	95	95	-	100	93,85
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Tidak terdapat PPKS gelandangan dan pengemis diluar panti				
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	70	70	-	100	100

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi atas pelaksanaan aktivitas keuangan secara efektif, seperti prosedur pengendalian utama dalam proses transaksi keuangan maka Akuntabilitas keuangan dimaknai sebagai pertanggungjawaban integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berikut disajikan Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Sosial tahun anggaran 2025 :

Tabel 3.16. Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2025

URAIAN PROGRAM	ALOKASI BELANJA	REALISASI	%
Program Rehabilitasi Sosial	Rp348.912.000	Rp333.027.361	95.45
Program Pemberdayaan Sosial	Rp218.082.800	Rp218.082.800	100
Program Penanganan Bencana	Rp220.082.800	Rp208.820.300	94,92
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp89.773.900	Rp89.761.800	99,99
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp2.071.477.753	Rp2.003.512.072	96,72
Jumlah	**Rp2.948.246.553**	**Rp2.853.203.893**	**96,78**

Tabel 3.16. Gambaran Efisiensi pada Akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran (DPA Pokok 2025)	Pagu Perubahan Anggaran (DPA perubahan 2025)	Nilai Efisiensi (%)	Keterangan
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 464.000.000	Rp. 348.912.100	24,8	Terdapat Refocusing untuk Efisiensi Anggaran sebagai tindak lanjut Intruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 500.000.000	Rp. 0	100	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.663.867.318	Rp. 2.065.761.882	22,45	
4	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 157.995.000	Rp 218.082.800		Terdapat alokasi penambahan anggaran untuk mendukung program Prioritas sekolah rakyat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat digambarkan bahwa pada tahun 2025 terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebagai tindaklanjut ketaatan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 yang dalam implementasinya memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk melakukan "refocusing" anggaran belanja yang telah ditetapkan terutama pada belanja yang sifatnya operasional (belanja pengadaan peralatan dan mesin, operasional perkantoran dan perjalanan dinas), diarahkan kepada pemenuhan belanja yang lebih prioritas, sehingga pada Dinas Sosial terdapat 3 (tiga) Program yang anggarannya dilakukan refocusing yaitu Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Mencermati penggunaan anggaran pada 3 (tiga) program dimaksud maka terdapat efisiensi anggaran yang cukup signifikan yaitu pada program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar 100%, Program Rehabilitasi Sosial nilai efisiensi anggaran sebesar 24,8% dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 22,45% dengan jumlah total anggaran yang diefisienkan sebesar Rp1.213.193.336, anggaran ini selanjutnya direfocusing dan dipergunakan untuk pelaksanaan program prioritas Pemerintah Daerah lainnya yang esensial sebagaimana amanat Inpres 1 tahun 2025.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap percepatan dan optimalisasi program strategis nasional maka

terdapat salah satu kegiatan prioritas nasional pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang lokusnya di Kabupaten Polewali Mandar sehingga pada Perubahan APBD tahun 2025 dialokasikan penambahan anggaran pada Dinas Sosial melalui Program Pemberdayaan Sosial yang semula pada saat penetapan APBD Pokok anggaran dialokasikan sebesar Rp 157.995.000 menjadi sebesar Rp218.082.800 pada perubahan, alokasi penambahan difokuskan untuk mendukung operasionalisasi pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Polewali Mandar.

BAB IV
PENUTUP



KESIMPULAN

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2025, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 juga dapat dijadikan acuan dalam penentuan serta kebijakan yang akan diambil pada tahun berikutnya.

Permasalahan keterbatasan anggaran menjadi persoalan klasik dan sulit dihindari mengingat adanya kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi, di sisi lain pelaksanaan program dan kegiatan apapun itu tentu akan mudah dicapai keberhasilannya jika ditopang ketersediaan anggaran yg memadai. Dinas Sosial sebagai peng-ampu urusan sosial dibebani target capaian SPM yang mampu setidaknya memberikan pelayanan dan penanganan maksimal kepada kelompok sasaran.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2025, dapat dinyatakan **"berhasil".** Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Sosial sebesar **100%** serta capaian kinerja keuangan sebesar **95,74%.** Kondisi ini memperlihatkan Dinas Sosial berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar **11,68%.**

Pemenuhan pencapaian layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial tahun 2025 meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota juga mampu dicapai dengan sangat baik yaitu ditunjukkan dengan realisasi rata-rata **95,46%,** kecuali pada aspek rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti yang memang sasaran layanan tidak terdapat di Kabupaten Polewali Mandar.

Kepala Dinas Sosial,

H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19730711 199203 1 001

LAMPIRAN -LAMPIRAN



Lampiran

Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL
Jalan H.A Depu No. 147 Polewali Kode Pos 91315
Website: www.dinsos.polmankab.go.id email: dinsos@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAMSUL MAHMUD**
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami, kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang beriorentasi hasil.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Bupati Polewali Mandar,

SAMSUL MAHMUD

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Sosial,

H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19730711 199203 1 001

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	50%	57,69%	57,69%
2	Meningkatnya Kepuasan Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana	Indeks Kepuasan Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Representatif, Tertata, dan Terpelihara dengan Baik	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB

PROGRAM		ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KETERANGAN
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp92.605.400	Rp218.082.800	DAU
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp348.912.100	Rp348.912.100	DAU SG
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp0	Rp0	-
4.	Program Penanganan Bencana	Rp220.000.000	Rp220.000.000	DAU SG

5.	Program Taman Makam Pahlawan	Rp57.887.100	Rp89.773.900	DAU
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.057.613.619	Rp2.065.761.882	DAU, PAD

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Polewali Mandar,

SAMSUL MAHMUD

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Sosial,

H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19730711 199203 1 001

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Indikator Kinerja
Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Dengan membaiknya kualitas hidup PPKS maka akan mendorong peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat	*Jumlah Jenis PPKS yang Difasilitasi Pemberdayaan Sosial* / *Jumlah Total Jenis PPKS yang Seharusnya ditangani dalam 1 Tahun* x 100	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
			Jumlah Jenis PPKS yang Difasilitasi Rehabilitasi Sosial / *Jumlah Total Jenis PPKS yang Seharusnya ditangani dalam 1 Tahun* x 100	Bidang Rehabilitasi Sosial

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	57,69%	Target 57,69 % adalah angka capaian yang sangat rasional mengingat pagu anggaran yang sangat fluktiatif meskipun capaian pengukuran kinerja tahunan sering melebihi dari target yang diperjanjikan di awal tahun.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kepuasan Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana

Masyarakat Korban Bencana baik Korban Bencana Alam/Sosial merupakan kelompok masyarakat yang seketika mengalami kerentanan Sosial pasca kejadian Bencana terjadi, terganggunya beberapa fungsi sosial salah satunya keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar makan dan tempat tinggal sehingga intervensi pemenuhan kebutuhan tersebut wajib dilaksanakan, dan diharapkan intervensi yg dilakukan mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar makan maupun shelter (hunian sementara) kepada Korban.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kepuasan Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana	Penyaluran bantuan logistik untuk korban bencana adalah bentuk bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak kejadian bencana diharapkan dengan bantuan tersebut mampu meningkatkan kepuasan terhadap layanan perlindungan sosial korban bencana dan mengatasi permasalahan sosial baru yang akan muncul.	A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00 B (Baik) : 76,61 - 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Indeks Kepuasan Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana	Sangat Baik (100%)	Tingkat kepuasan layanan perlindungan sosial korban bencana adalah salah satu capaian kinerja yang masuk SPM layanan Wajib sehingga target 100% yang menjadi capaian setiap tahun wajib dilaksanakan

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Representatif, Tertata, dan terpelihara dengan Baik

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) meliputi pembinaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan kawasan, serta pengaturan izin ziarah dan kegiatan sosia. Melalui pengelolaan TMP diharapkan mampu menjadi wadah tumbuh kembalinya semangat kesetiakawanan, Keperintisan serta Nasionalisme generasi yg ada dalam tetap melestarikan nilai-nailai luhur yang ditinggalkan pendahulunya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki tiga indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Representatif, Tertata, dan terpelihara dengan Baik	Dengan membaiknya kualitas pengelolaan TMP maka akan mendorong pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional terlaksana dengan khidmat dan menumbuhkan semangat nasionalisme.	$= \frac{\text{Jumlah TMPN yang dikelola}}{\text{Jumlah Total TMPN}} \times 100$	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	100%	Pengelolaan TMP melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana sangat realistis untuk diwujudkan sehingga target ditetapkan 100% untuk mendukung pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki tiga indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, orientasi hasil dan lebih berdampak.	Predikat SAKIP meliputi: AA > 90-100 : Sangat Memuaskan A > 80 - 90 : Memuaskan BB > 70 - 80 : Sangat Baik B > 60 - 70 : Baik CC > 50 - 60 : Cukup C > 30 - 50 : Kurang D > 0 - 30 : Sangat Kurang	Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	Target SAKIP BB tahun 2025 merupakan target yang rasional mengingat capaian periode sebelumnya yang masih berada di predikat BB.

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL
Jalan H.A Depu No. 147 Polewali Kode Pos 91315
Website: www.dinsos.polmankab.go.id email: dinsos@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ANSYARI BAHRUM, S. STP., M. Adm.KP**
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial,

H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19730711 199203 1 001

Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Sosial,

ANSYARI BAHRUM, S. STP.,M.Adm. KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19820228 200212 1 001

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	100%	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KETERANGAN
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp2.244.700	Rp2.244.700	DAU
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.698.844.499	Rp1.691.992.762	DAU
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp0	Rp0	-
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp66.148.420	Rp112.743.420	DAU, PAD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp271.296.000	Rp218.896.000	PAD
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp19.080.000	Rp39.885.000	DAU, PAD
	JUMLAH	**Rp2.057.613.619**	**Rp2.065.761.882**	

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial,

H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19730711 199203 1 001

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Sosial,

ANSYARI BAHRUM, S. STP.,M.Adm. KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19820228 200212 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL
Jalan H.A Depu No. 147 Polewali Kode Pos 91315
Website: www.dinsos.polmankab.go.id email: dinsos@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Hj. KASMAWATI, SE**
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANSYARI BAHRUM, S. STP., M. Adm.KP**
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Sosial,

ANSYARI BAHRUM, S. STP.,M.Adm. KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19820228 200212 1 001

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Hj. KASMAWATI, SE
Pangkat : Penata Tingkat I
NIP : 19780424 200502 2 008

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	**Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**
1.	Terlaksanya penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
II	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	100%	100%
2.	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket
3.	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket
4.	Tersedianya kebutuhan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket
5.	Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket
6.	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
7.	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan
III	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur**	**100%**	**100%**	**100%**
8.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

9.	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan jasa penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
IV	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Sesuai RKBMD**	**100%**	**100%**	**100%**
10.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	8 Unit	8 Unit
11.	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	10 unit	10 unit
12.	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KETERANGAN
I	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Rp0**	**Rp0**	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp0	Rp0	
II	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp66.148.420**	**Rp112.743.420**	
2.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp0	Rp0	
3.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp7.864.000	Rp28.056.000	
4.	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp6.720.000	Rp18.645.000	
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp0	Rp1.278.000	
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp1.080.000	Rp1.080.000	

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KETERANGAN
7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp50.484.420	Rp63.684.420	
III	**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp271.296.000**	**Rp218.896.000**	
8.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp60.696.000	Rp40.696.000	
9.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp210.600.000	Rp178.200.000	
IV	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp19.080.000**	**Rp39.885.000**	
10.	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp19.080.000	Rp32.455.000	
11.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp0	Rp7.430.000	
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp2.000.000	Rp0	

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Sosial,

ANSYARI BAHRUM, S. STP.,M.Adm. KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19820228 200212 1 001

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Hj. KASMAWATI, SE
Pangkat : Penata Tingkat I
NIP :19780424 200502 2 008

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL
Jalan H.A Depu No. 147 Polewali Kode Pos 91315
Website: www.dinsos.polmankab.go.id email: dinsos@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Sub Koordinator Perencana Ahli Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANSYARI BAHRUM, S. STP., M. Adm.KP**
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua, Sekretaris Dinas Sosial,	Pihak Pertama, Sub Koordinator Perencana Ahli Pertama,
ANSYARI BAHRUM, S. STP.,M.Adm. KP Pangkat : Pembina NIP : 19820228 200212 1 001	Pangkat : NIP :

PERJANJIAN KINERJA
SUB KOORDINATOR PERENCANA AHLI PERTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersusun sesuai standar dan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
2.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
3.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
II	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**
5.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang	23 Orang	23 Orang
6.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KETERANGAN
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp2.244.700**	**Rp2.244.700**	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp624.700	Rp624.700	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp1.620.000	Rp1.620.000	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp0	Rp0	
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp0	Rp0	
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp1.698.844.499**	**Rp1.691.992.762**	
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.698.844.499	Rp1.691.992.762	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0	Rp0	

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Sosial,

ANSYARI BAHRUM, S. STP.,M.Adm. KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19820228 200212 1 001

Pihak Pertama,
Sub Koordinator Perencana
Ahli Pertama,

Pangkat :
NIP :

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL
Jalan H.A Depu No. 147 Polewali Kode Pos 91315
Website: www.dinsos.polmankab.go.id email: dinsos@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hj. FITRIANI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial,

H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19730711 199203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
dan Fakir Miskin,

Hj. FITRIANI, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 19780809 201001 2 010

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN FAKIR MISKIN
DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Keberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	0%	100%	100%
2.	Terjaminnya keamanan, kebersihan dan keasrian Taman Makam Pahlawan	Persentase AreaTaman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100%	100%	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Rp0	Rp27.531.900	DAU
2.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp92.605.400	Rp190.550.900	DAU
3.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp57.887.100	Rp89.773.900	DAU
	JUMLAH	**Rp150.492.500**	**Rp307.856.700**	

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial,

H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19730711 199203 1 001

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin,

Hj. FITRIANI, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 19780809 201001 2 010

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL
Jalan H.A Depu No. 147 Polewali Kode Pos 91315
Website: www.dinsos.polmankab.go.id email: dinsos@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ILHAM BAHARUDDIN, S. E., M. Si**
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Hj. FITRIANI, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin,

Hj. FITRIANI, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP :19780809 201001 2 010

Pihak Pertama,
Pekerja Sosial Ahli Muda,

ILHAM BAHARUDDIN, S. E., M. Si.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 198102026 201001 1 012

PERJANJIAN KINERJA
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA
DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk Mendorong Kemandirian dan Integrasi Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat**	**Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**97 Keluarga**	**139 Keluarga**	**139 Keluarga**
1.	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	97 Keluarga	139 Keluarga	139 Keluarga
II	**Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial guna Mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Efektif dan Berkelanjutan**	**Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota**	**0**	**31 Keluarga**	**31 Keluarga**
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	31 Keluarga	31 Keluarga

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KETERANGAN
I	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**Rp0**	**Rp27.531.900**	
1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	Rp0	Rp27.531.900	
II	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp92.605.400**	**Rp190.550.900**	
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp92.605.400	Rp190.550.900	

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin,

Hj. FITRIANI, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP :19780809 201001 2 010

Pihak Pertama,
Pekerja Sosial Ahli Muda,

ILHAM BAHARUDDIN, S. E., M. Si.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP :198102026 201001 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL
Jalan H.A Depu No. 147 Polewali Kode Pos 91315
Website: www.dinsos.polmankab.go.id email: dinsos@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **.....**
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Hj. FITRIANI, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin,	Pihak Pertama, Pekerja Sosial Ahli Muda,
Hj. FITRIANI, S.Sos., M.Si Pangkat : Pembina NIP :19780809 201001 2 010	**.....** Pangkat : NIP :

PERJANJIAN KINERJA
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA
DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	**Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota secara Rutin untuk Mendukung Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan**	**Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota**	**82 Makam**	**82 Makam**	82 Makam
1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	82 Makam	82 Makam	82 Makam

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KETERANGAN
I	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Rp57.887.100**	**Rp89.773.900**	
1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp57.887.100	Rp89.773.900	

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin,

Hj. FITRIANI, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 19780809 201001 2 010

Pihak Pertama,
Pekerja Sosial Ahli Muda,

.....
Pangkat :
NIP :

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL
Jalan H.A Depu No. 147 Polewali Kode Pos 91315
Website: www.dinsos.polmankab.go.id email: dinsos@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ANDI SUMARNI, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. AZWAR JASIN, S.Sos. , M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua, Kepala Dinas Sosial,	Pihak Pertama, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,
H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si	**ANDI SUMARNI, S.Sos., MM**
Pangkat : Pembina Utama Muda	Pangkat : Pembina
NIP : 19730711 199203 1 001	NIP : 19790302 200212 2 005

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraaan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	18,04%	20,62%	20,62%
		Persentase lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	27,49%	30,93%	30,93%
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	14,60%	21,90%	21,90%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp293.824.200	Rp291.241.800	DAU SG
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp55.087.900	Rp57.670.300	DAU SG
	JUMLAH	**Rp348.912.100**	**Rp348.912.100**	

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial,

H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19730711 199203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,

ANDI SUMARNI, S.Sos., MM
Pangkat : Pembina
NIP : 19790302 200212 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL
Jalan H.A Depu No. 147 Polewali Kode Pos 91315
Website: www.dinsos.polmankab.go.id email: dinsos@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANDI SUMARNI, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,

ANDI SUMARNI, S.Sos., MM
Pangkat : Pembina
NIP : 19730711 199203 1 001

Pihak Pertama,
Pekerja Sosial Ahli Muda,

.....
Pangkat :
NIP :

PERJANJIAN KINERJA
PEKERJA SOSIAL I AHLI MUDA
DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	**Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti untuk Meningkatkan Keberfungsian Sosialnya**	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota**	**150 Orang**	**100 Orang**	**100 Orang**
1.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	100 Orang	100 Orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KETERANGAN
I	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Rp293.824.200**	**Rp291.241.800**	
1.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp293.824.200	Rp291.241.800	

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,

ANDI SUMARNI, S.Sos., MM
Pangkat : Pembina
NIP : 19790302 200212 2 005

Pihak Pertama,
Pekerja Sosial Ahli Muda,

.....
Pangkat :
NIP :

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL
Jalan H.A Depu No. 147 Polewali Kode Pos 91315
Website: www.dinsos.polmankab.go.id email: dinsos@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PAISAL, S. H., M. Si**
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANDI SUMARNI, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,

ANDI SUMARNI, S.Sos., MM
Pangkat : Pembina
NIP :19790302 200212 2 005

Pihak Pertama,
Pekerja Sosial Ahli Muda,

PAISAL, S. H., M. Si
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19671205 200801 1 015

PERJANJIAN KINERJA
PEKERJA SOSIAL II AHLI MUDA
DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	**Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Bertujuan Meningkatkan Fungsi Sosial dan Kemandirannya dalam Kehidupan Bermasyarakat**	**Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota**	**60 Orang**	**40 Orang**	**40 Orang**
1.	Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	40 Orang	40 Orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KETERANGAN
I	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Rp55.087.900**	**Rp57.670.300**	
1.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp55.087.900	Rp57.670.300	

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

ANDI SUMARNI, S.Sos., MM
Pangkat : Pembina
NIP :19790302 200212 2 005

Pihak Pertama,
Pekerja Sosial Ahli Muda

PAISAL, S. H., M. Si
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19671205 200801 1 015

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL
Jalan H.A Depu No. 147 Polewali Kode Pos 91315
Website: www.dinsos.polmankab.go.id email: dinsos@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua, Kepala Dinas Sosial,	Pihak Pertama, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,
H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19730711 199203 1 001	Pangkat : NIP :

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	100%	100%	100%
2.	Optimalnya layanan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang Terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp0	Rp0	-
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp220.000.000	Rp220.000.000	DAU SG
	JUMLAH	**Rp220.000.000**	**Rp220.000.000**	

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial,

H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19730711 199203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Pangkat :
NIP :

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL
Jalan H.A Depu No. 147 Polewali Kode Pos 91315
Website: www.dinsos.polmankab.go.id email: dinsos@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SYAFRUDDIN, S. E**
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : .....
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Pangkat :
NIP :

Pihak Pertama,
Pekerja Sosial Ahli Muda,

SYAFRUDDIN, S. E
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19710701 200701 1 015

PERJANJIAN KINERJA
PEKERJA SOSIAL I AHLI MUDA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	**Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Tingkat Kabupaten/Kota guna Menjamin Akurasi Data dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kemiskinan**	**Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan**	**165.000 Usulan**	**170.000 Usulan**	**170.000 Usulan**
1.	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	165.000 Usulan	170.000 Usulan	170.000 Usulan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KETERANGAN
I	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp0**	**Rp0**	
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp0	Rp0	

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Pihak Pertama,
Pekerja Sosial Ahli Muda,



SYAFRUDDIN, S. E
Pangkat : Penata Tk. I
NIP :19710701 200701 1 015

Pangkat :
NIP

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL
Jalan H.A Depu No. 147 Polewali Kode Pos 91315
Website: www.dinsos.polmankab.go.id email: dinsos@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MULIYADI, S. Sos**
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : .....
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Pangkat :
NIP :

Pihak Pertama,
Pekerja Sosial Ahli Pertama,

MULIYADI, S. Sos
Pangkat : Penata
NIP : 19820209 200502 1 003

PERJANJIAN KINERJA
PEKERJA SOSIAL I AHLI MUDA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
I	**Terselenggaranya Perlindungan Sosial yang Responsif bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**79 Orang**	**50 Orang**	**50 Orang**
1.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	79 Orang	50 Orang	70 Orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KETERANGAN
I	**Penyediaan Makanan**	**Rp220.000.000**	**Rp220.000.000**	
1.	Penyediaan Makanan	Rp220.000.000	Rp220.000.000	

Polewali, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Pihak Pertama,
Pekerja Sosial Ahli Pertama,

MULIYADI, S. Sos
Pangkat : Penata
NIP : 19820209 200502 1 003

Pangkat :
NIP :

Pengukuran Kinerja Tahun 2025



Pengukuran Kinerja Eselon II

No	Tahun	Pejabat	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(a/b)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
1	2025	Kepala Dinas Sosial	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	predikat	BB	B	B	B	B	B	B	BB	B	B	B	B	B	BB	77.97
2	2025	Kepala Dinas Sosial	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sarpras Wahana Pelatihan yang Representatif, Terkini dan Teknologi Tepat Guna	Persentase Sarpras Wahana Pelatihan Nasional yang terkelola dengan baik	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
3	2025	Kepala Dinas Sosial	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pelindungan Sosial Korban Bencana	Indeks Kapasitas Layanan Pelindungan Sosial Korban Bencana	Indeks	Rangkuti Dalam	Rangkuti Dalam	Rangkuti Dalam	Rangkuti Dalam	Rangkuti Dalam	Rangkuti Dalam	Rangkuti Dalam	Rangkuti Dalam	Rangkuti Dalam	Rangkuti Dalam	Rangkuti Dalam	Rangkuti Dalam	Rangkuti Dalam	Rangkuti dalam	100.00
4	2025	Kepala Dinas Sosial	Meningkatnya Kualitas Hidup Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	persen	57.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.83	57.83	100.00
5	2025	Kepala Dinas Sosial	Meningkatnya Kualitas Hidup Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	persen	57.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.83	0	0	57.83	100.00
6	2025	Kepala Dinas Sosial	Meningkatnya Kualitas Hidup Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	persen	57.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.83	57.83	100.00

Pengukuran Anggaran Eselon II

No	Tahun	Pejabat	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran													Realisasi(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
1	2025	Kepala Dinas Sosial	Pelayanan Dukungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.685.751.382	181.410.947	181.410.947	227.424.177	264.555.595	58.660.059	214.454.037	165.434.400	136.432.162	155.951.975	221.950.341	149.726.082	274.555.560	2.261.512.972	84.20
2	2025	Kepala Dinas Sosial	Pengelolaan Sarana Wahana Pelatihan	63.773.550							47.7 5.000	15.550.560				11.000.000	63.751.550	99.99
3	2025	Kepala Dinas Sosial	Pelayanan Bencana	220.560.000					47.864.550		54.909.600			60.864.550	50.575.000	35.507.350	250.670.300	84.82
4	2025	Kepala Dinas Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	0														
5	2025	Kepala Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	345.812.100							10.930.640	42.052.300	212.465.250	17.629.000	34.877.412	17.930.500	333.077.301	96.45
6	2025	Kepala Dinas Sosial	Pemberdayaan Sosial	210.982.500								17.753.000			85.644.794	114.643.975	218.062.300	103.00

Pengukuran Kinerja Eselon III (Program)

No	Tahun	Pejabat	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
1	2025	Kepala Bidang Pelindungan, Dan Jaminan Sosial Dan Fakir Miskin	Optimalnya Layanan pelindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Manusia Non Alam yang Tercatat/ Terkelola Dalam Data Sosial dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	persen	100	18	10	11	15	18	11	10	18	11	11	15	18	100	100.00
2	2025	Pelaksana Bidang 1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan jaminan sosial	Persentase Sosial rentanmen yang telah Mendapatkan Pengamanan dan Pelayanan Data Fakir Miskin dengan tepat dan valid	persen	100	8	9	9	9	8	8	9	9	100	9	9	9	100	100.00
3	2025	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar serta Korban Tindak Kekerasan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	21.99	0	0	0	0	0	0	0	0	21.99	0	0	0	21.9	100.00
4	2025	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar serta Korban Tindak Kekerasan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	30.83	0	0	0	0	0	0	0	0	30.83	0	0	0	30.83	100.00
5	2025	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar serta Korban Tindak Kekerasan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	22.62	0	0	0	0	0	0	0	0	28.62	0	0	0	28.62	100.00
6	2025	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin	Meningkatnya Pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	persen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	100.00
7	2025	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin	Terjalinnya kemitraan, kerjasama dan koordinasi Sosial dengan Pemerintah	Persentase Aset Sosial Warisan Pahlawan Nasional yang terfasilitasi dengan baik	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
8	2025	Sekretaris Dinas	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pendukungan kerja	Persentase kerja koordinasikan kantor	persen	100	8	8	25	8	8	25	8	8	25	8	8	25	100	100.00
9	2025	Sekretaris Dinas	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pendukungan kerja	Persentase penyelesaian dokumen keuangan secara standar dan tepat waktu	persen	100	8	8	25	8	8	25	8	8	25	8	8	25	100	100.00
10	2025	Sekretaris Dinas	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pendukungan kerja	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar yang ditentukan secara standar dan tepat waktu	persen	100	8	8	8	8	8	16	8	8	8	16	8	8	100	100.00

Pengukuran Anggaran Eselon III (Program)



Pengukuran Kinerja Eselon III (Kegiatan)

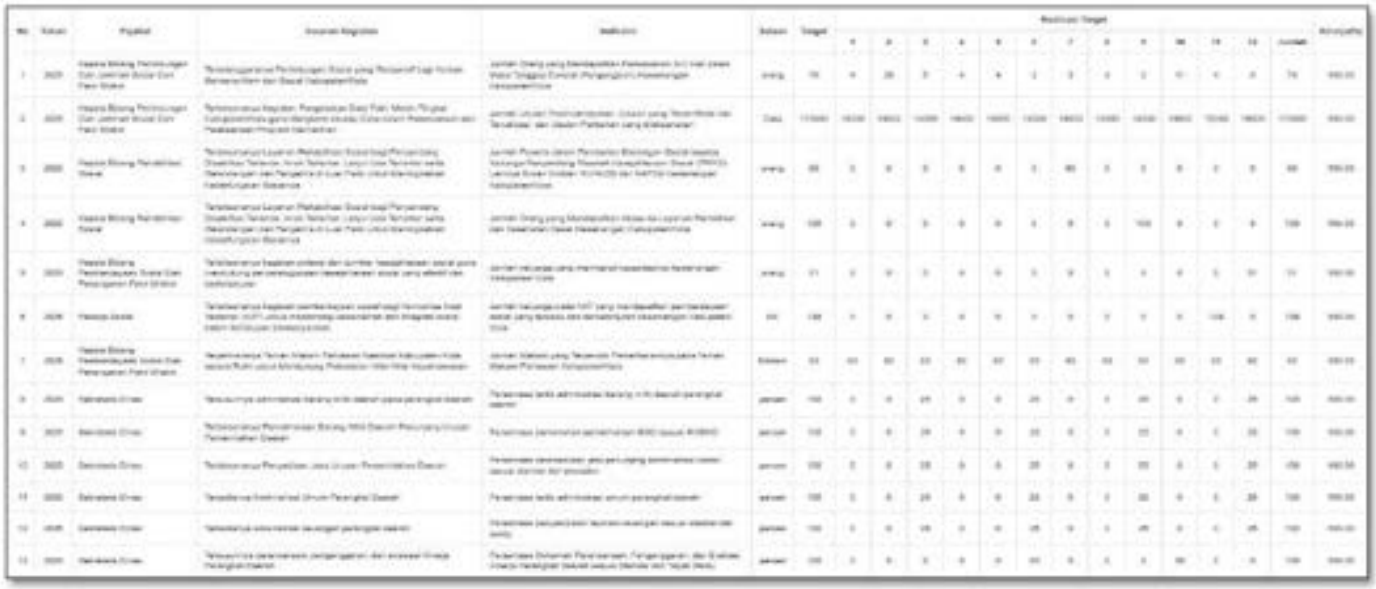

Pengukuran Anggaran Eselon III (Kegiatan)

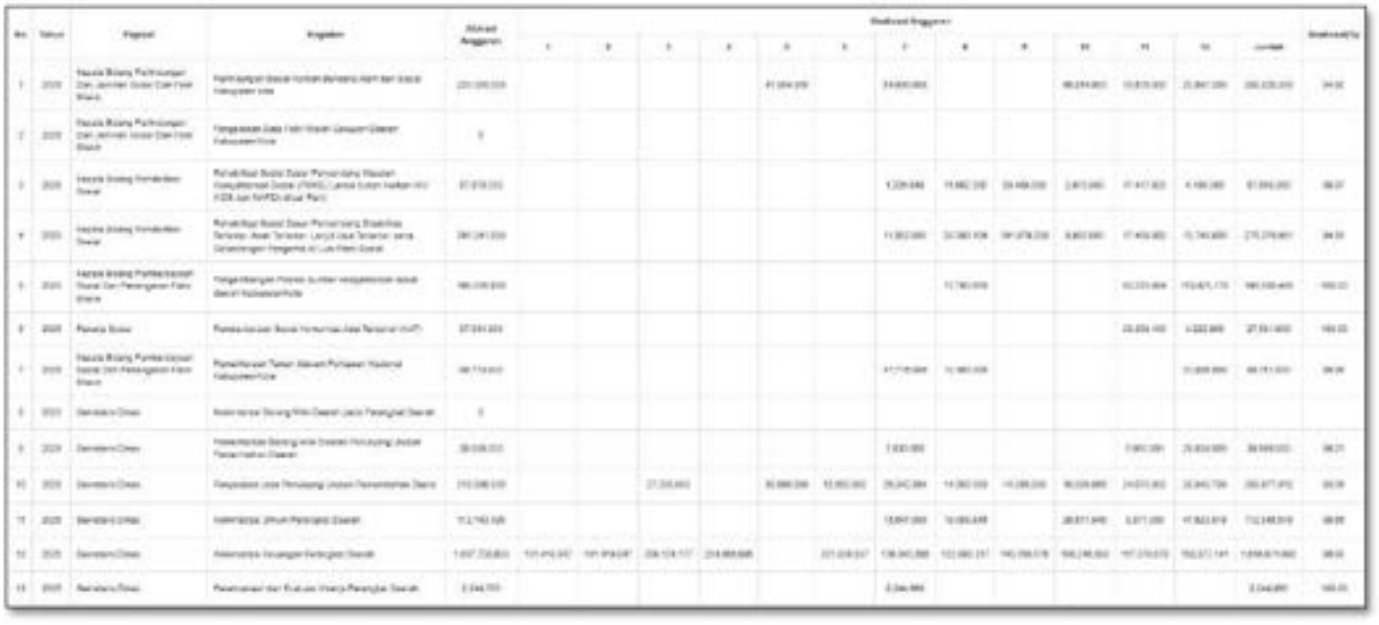

Pengukuran Kinerja Eselon IV (Kegiatan)

No	Tahun	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja (%)
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jumlah	
1	2025	Pelayan Sosial 2	Terlaksanyanya Pemberdayaan Sosial yang Responsif Gugi Harkan Berkelanjutan dan Sosial Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial Kesiapsiagaan Sosial Dan Penanganan Bencana di Kabupaten Kota	orang	70	4	22	0	4	4	0	1	1	0	11	4	0	70	100.00
2	2025	Pelayan Sosial 1	Terlaksanyanya Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Dalam Kabupaten Kota yang Mencakup Akurasi Data dalam Pemutakhiran dan Pemeliharaan Program Kemiskinan	Jumlah Usulan Pemutakhiran Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang Ditindaklanjuti	Data	173033	14403	14403	14403	14403	14403	14403	14403	14403	14403	14403	15033	13030	173030	100.00
3	2025	Pelayan Sosial 2	Terlaksanyanya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti untuk Meningkatkan Keberfungsian Sosialnya	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Kelayanlansia Sosial (PMKS) Lainnya dalam Jumlah Hiv/AIDS dan NAPZA Lewat Bengan Kabupaten Kota	orang	80	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80	100.00
4	2025	Pelayan Sosial 1	Terlaksanyanya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti untuk Meningkatkan Keberfungsian Sosialnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pemulihan dan Intervensi Dasar Gelandangan Kabupaten Kota	orang	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	100.00
5	2025	Pelayan Sosial	Terlaksanyanya kegiatan pasma dan sumber kesejahteraan sosial guna pemberdayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang efektif dan berkelanjutan	Jumlah Keluarga yang memenuhi kesejahteraan kebersamaan Kabupaten Kota	orang	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	100.00
6	2025	Pelayan Sosial	Terlaksanyanya kegiatan identifikasi sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk mendorong kemandirian dan integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah kelompok sosial KAT yang mendapatkan pemberdayaan sosial yang terpadu dan berkelanjutan kesejahteraan Kabupaten Kota	KK	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	130	100.00
7	2025	Pelayan Sosial	Terlaksanyanya Fasilitasi kegiatan Kabupaten Kabupaten Kabupaten/Kota secara Aktif untuk Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Kepemerintahan	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana Terlaksananya pada Tahun Kegiatan Kabupaten/Kota	Kegiatan	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	100.00
8	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah	persen	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100	100.00
9	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKBMD	persen	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100	100.00
10	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keberadaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur	persen	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100	100.00
11	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	persen	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100	100.00
12	2025	Keuangan	Terlaksanya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan sesuai standar dan waktu	persen	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100	100.00
13	2025	Keuangan	Terlaksanya penatausahaan pengelolaan, dan analisa laporan keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penatausahaan, Pengelolaan dan Evaluasi Laporan Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu	persen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100.00

Pengukuran Anggaran Eselon IV (Kegiatan)

No	Tahun	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran													Persentase (%)
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jumlah	
1	2025	Pelayan Sosial 2	Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Kota	220.000.000					47.800.000		51.000.000			50.000.000	18.000.000	20.000.000	208.000.000	94.55
2	2025	Pelayan Sosial 1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0														
3	2025	Pelayan Sosial 2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Dalam	57.872.200							1.200.000	19.000.200	22.000.000	2.000.000	17.672.000		51.000.200	87.33
4	2025	Pelayan Sosial 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Dalam	241.241.833							11.000.000	32.000.158	141.676.200	3.000.000	17.000.000		211.833.333	88.04
5	2025	Pelayan Sosial	Pemberdayaan Potensi sumber kesejahteraan sosial di wilayah kabupaten/kota	100.000.000								11.700.000			82.000.000		93.700.000	93.70
6	2025	Pelayan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	27.000.000											25.000.100		25.000.100	92.59
7	2025	Pelayan Sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50.731.800							41.710.000	10.100.000				11.000.000	50.731.800	100.00
8	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0														
9	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.809.000							1.000.000				1.000.000	28.000.000	30.000.000	97.37
10	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.000.000			31.000.000		31.000.000	12.000.000	22.342.554	14.000.000	14.000.000	13.000.000	24.000.000	30.000.000	201.077.000	80.33
11	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.745.420							10.847.000	10.000.000		20.817.000	3.271.000	47.000.000	102.935.000	88.00
12	2025	Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.997.882.700	101.410.000	101.470.000	201.124.177	204.000.000		201.000.000	110.340.000	110.000.000	140.700.000	160.000.000	117.278.278	100.277.941	1.645.879.000	87.20
13	2025	Keuangan	Penatausahaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.344.700							2.344.000						2.344.000	100.00

Pengukuran Kinerja Eselon IV (Sub Kegiatan)

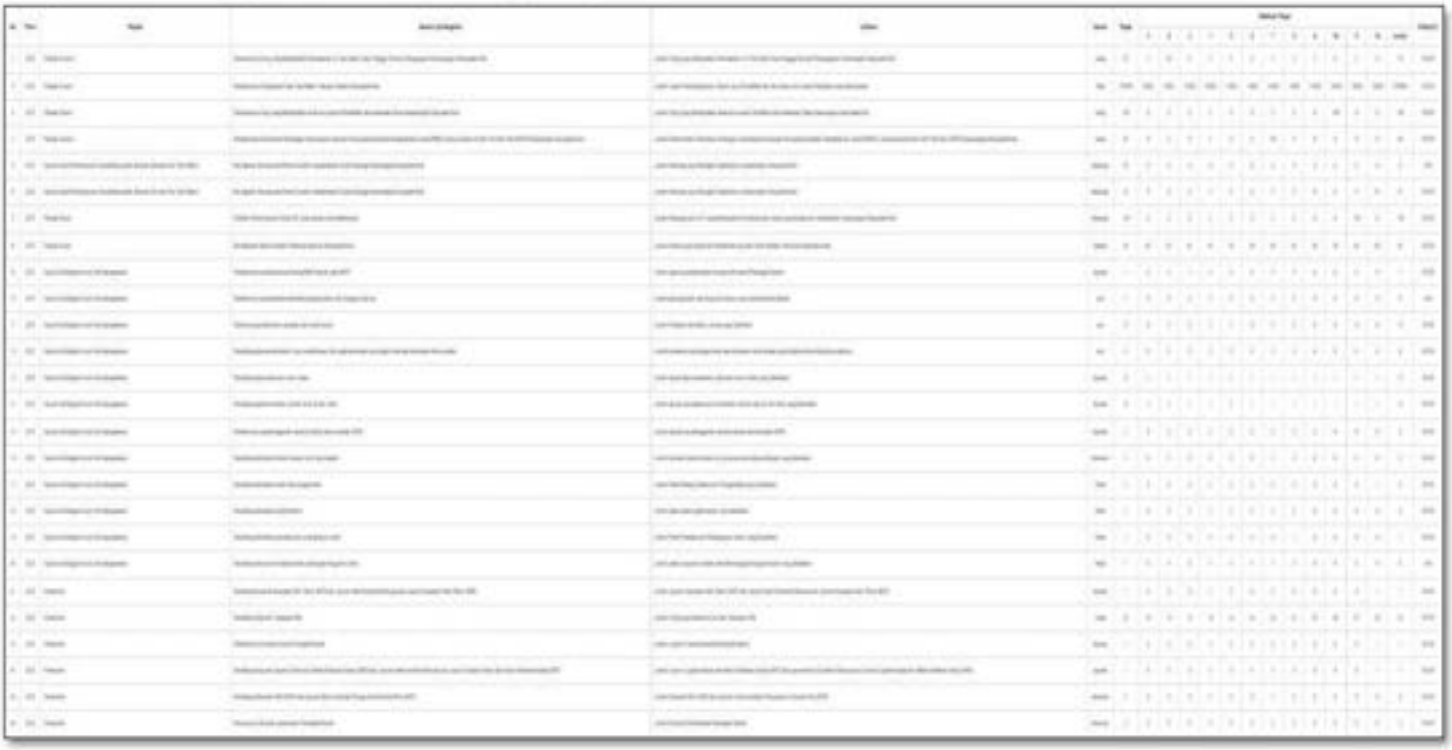

Pengukuran Kinerja Eselon IV (Sub Kegiatan)

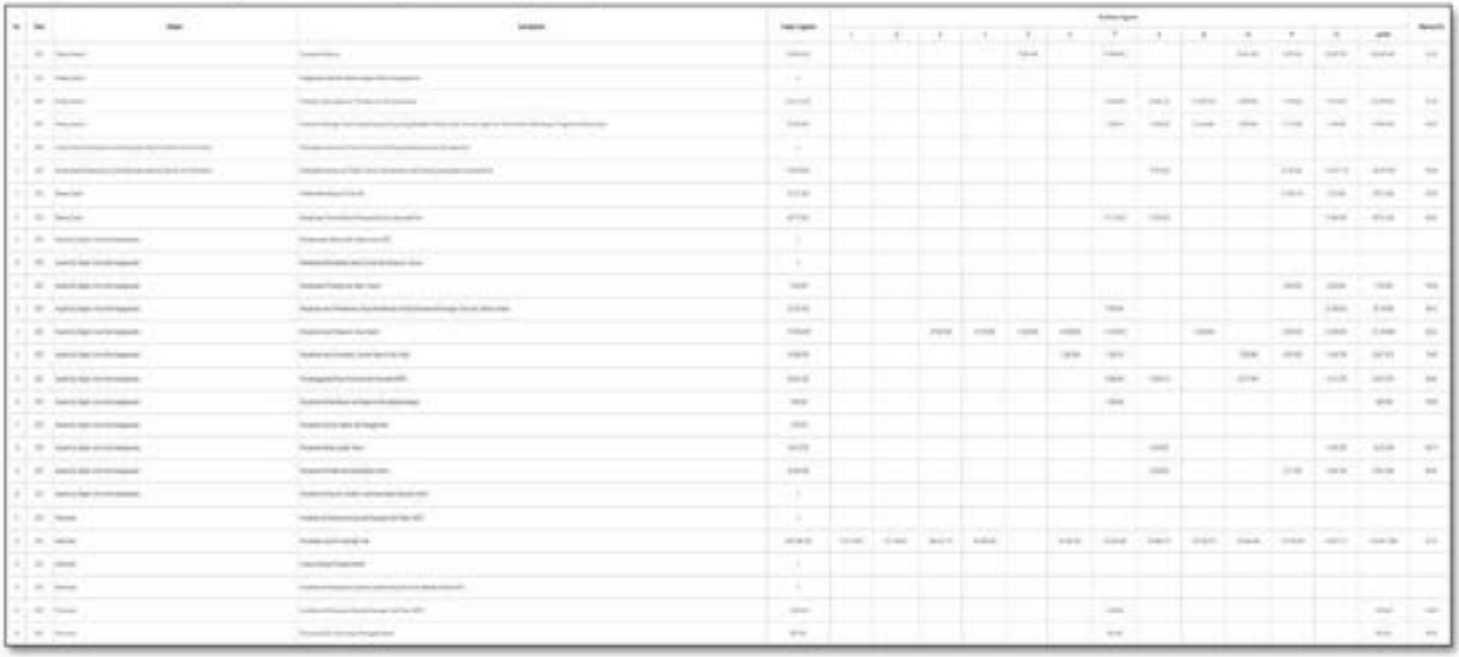

Polewali, 31 Desember 2025

Kepala Dinas

H. Azwar Jasin, S.Sos.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19730711 199203 1 001

Lampiran

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025



PEMERINTAHAN KAB. POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	**BELANJA DAERAH**	**2.948.246.553,00**	**2.853.283.893,00**	**96,77**	**3.311.758.687,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.933.121.553,00**	**2.838.090.393,00**	**96,76**	**3.301.325.297,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.697.708.633,00	1.645.671.890,00	96,93	1.516.675.713,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.539.856.097,00	1.512.002.654,00	98,19	1.516.675.713,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.164.180.563,00	1.140.854.404,00	98,76	1.148.651.654,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.144.958.963,00	1.130.632.804,00	98,74	1.148.651.654,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	19.221.600,00	19.221.600,00	100,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	98.474.769,00	92.759.200,00	94,19	97.218.046,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	95.783.745,00	90.068.176,00	94,03	97.218.046,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.691.024,00	2.691.024,00	100,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	96.057.425,00	95.410.000,00	99,32	106.100.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	96.057.425,00	95.410.000,00	99,32	106.100.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	32.305.250,00	30.840.000,00	95,46	26.565.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29.065.250,00	27.600.000,00	94,95	26.565.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.240.000,00	3.240.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	21.604.115,00	21.090.000,00	97,62	20.905.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.604.115,00	21.090.000,00	97,62	20.905.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	59.044.098,00	55.473.720,00	93,95	55.980.660,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	57.306.018,00	53.735.640,00	93,76	55.980.660,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.738.080,00	1.738.080,00	100,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.569.696,00	8.891.126,00	92,90	3.877.652,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.569.696,00	8.891.126,00	92,90	3.877.652,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	38.836,00	15.543,00	40,02	17.061,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.856,00	15.363,00	57,20	17.061,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11.980,00	180,00	1,50	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	48.979.343,00	48.112.998,00	98,23	47.917.566,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	47.972.838,00	47.106.894,00	98,19	47.917.566,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.006.505,00	1.006.104,00	99,96	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.423.653,00	2.388.906,00	98,56	2.360.747,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.377.511,00	2.342.772,00	98,53	2.360.747,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	46.142,00	46.134,00	99,98	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.178.349,00	7.166.757,00	99,83	7.082.327,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.039.943,00	7.028.361,00	99,83	7.082.327,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	138.406,00	138.396,00	99,99	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	157.852.536,00	133.669.236,00	84,67	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	157.852.536,00	133.669.236,00	84,67	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	157.852.536,00	133.669.236,00	84,67	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.162.412.920,00	1.119.418.503,00	96,30	1.784.649.544,00
5.1.02.01	Belanja Barang	472.454.342,00	454.115.612,00	96,11	475.349.473,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	472.454.342,00	454.115.612,00	96,11	475.349.473,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.398.100,00	6.386.000,00	99,81	6.488.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.745.000,00	3.745.000,00	100,00	2.760.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30.644.400,00	30.644.000,00	99,99	35.154.355,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.139.000,00	6.139.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.853.200,00	11.782.200,00	99,40	29.267.920,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.742.000,00	8.742.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.969.642,00	8.968.712,00	99,98	25.810.198,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	0,00	1.827.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.504.000,00	28.362.000,00	99,50	399.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	259.049.000,00	241.178.200,00	93,10	302.654.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	43.025.000,00	43.025.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	58.830.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	33.315.000,00	33.073.500,00	99,27	5.409.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.070.000,00	5.070.000,00	100,00	6.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	396.357.000,00	372.322.912,00	93,93	438.663.752,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	390.357.000,00	366.322.912,00	93,84	435.663.752,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	2.880.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.400.000,00	68.000.000,00	95,23	98.600.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	49.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	157.500.000,00	149.000.000,00	94,60	187.800.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	42.600.000,00	42.600.000,00	100,00	28.200.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	10.200.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.657.196,00	3.333.500,00	91,14	998.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	37.038.804,00	25.544.412,00	68,96	41.188.252,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00	1.440.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.881.000,00	5.565.000,00	94,62	5.157.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16.430.000,00	16.430.000,00	100,00	40.919.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.430.000,00	16.430.000,00	100,00	33.535.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00	3.050.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000,00	4.380.000,00	100,00	5.110.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	7.384.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	83.689.850,00	83.665.000,00	99,97	368.665.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	73.000.000,00	73.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.933.121.553,00**	**2.838.090.393,00**	**96,76**	**3.301.325.257,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**15.125.000,00**	**15.113.500,00**	**99,92**	**10.425.430,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.125.000,00	15.113.500,00	99,92	10.425.430,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	400.000,00	388.500,00	97,12	2.578.840,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	400.000,00	388.500,00	97,12	492.840,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	400.000,00	388.500,00	97,12	492.840,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	2.086.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	2.086.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	3.956.040,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	3.956.040,00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	3.956.040,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	14.725.000,00	14.725.000,00	100,00	3.890.550,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	14.725.000,00	14.725.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	14.725.000,00	14.725.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	3.890.550,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	3.890.550,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**15.125.000,00**	**15.113.500,00**	**99,92**	**10.425.430,00**
	JUMLAH BELANJA	**2.948.246.553,00**	**2.853.203.893,00**	**96,77**	**3.311.750.687,00**

Polewali, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS SOSIAL

Ir. AZWAR JASIN, S.Sos,M.Si
NIP. 197307111992031001

Pohon Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025



POHON KINERJA DINAS SOSIAL

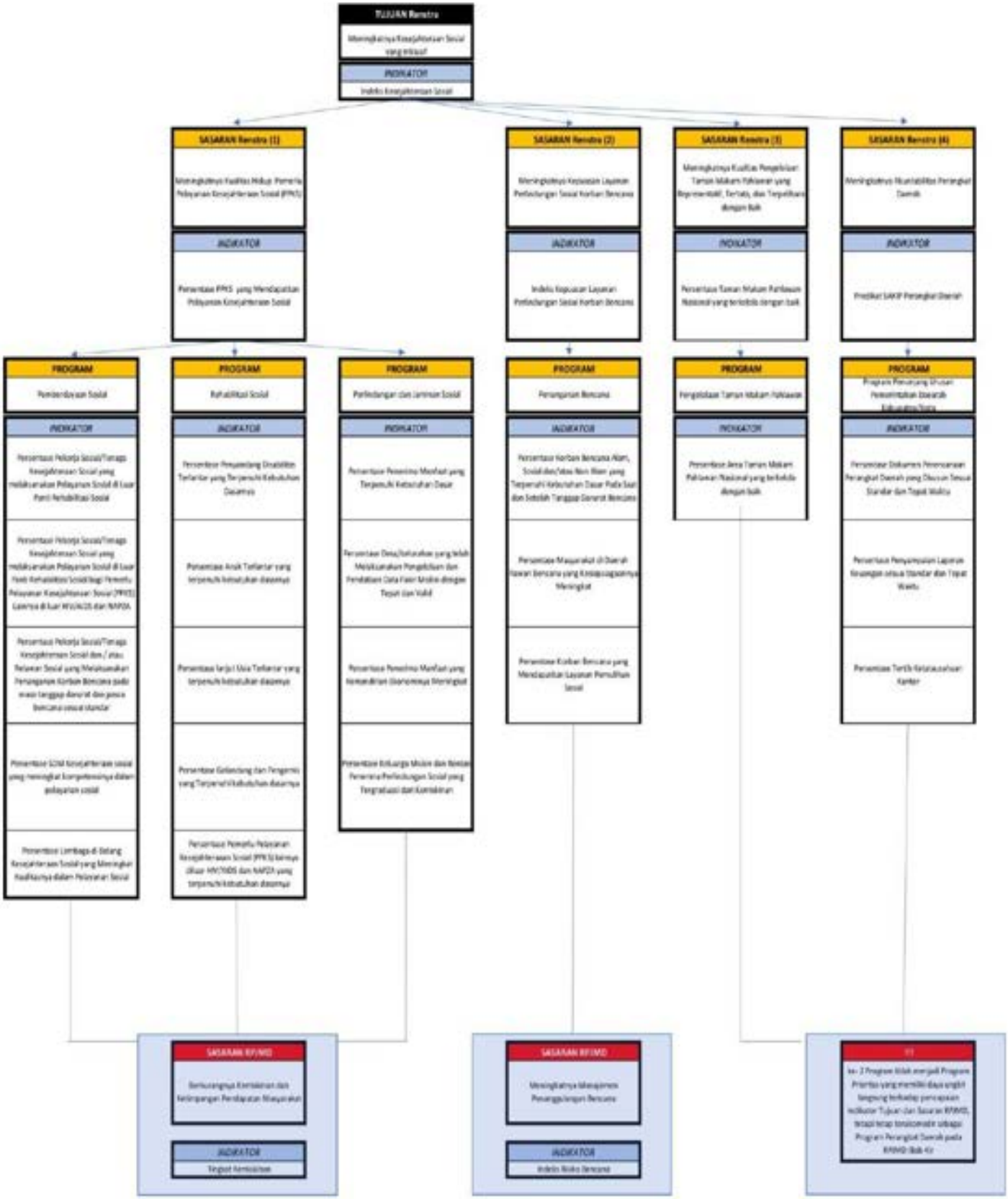

Laporan Monev Rencana Aksi Tahun 2025

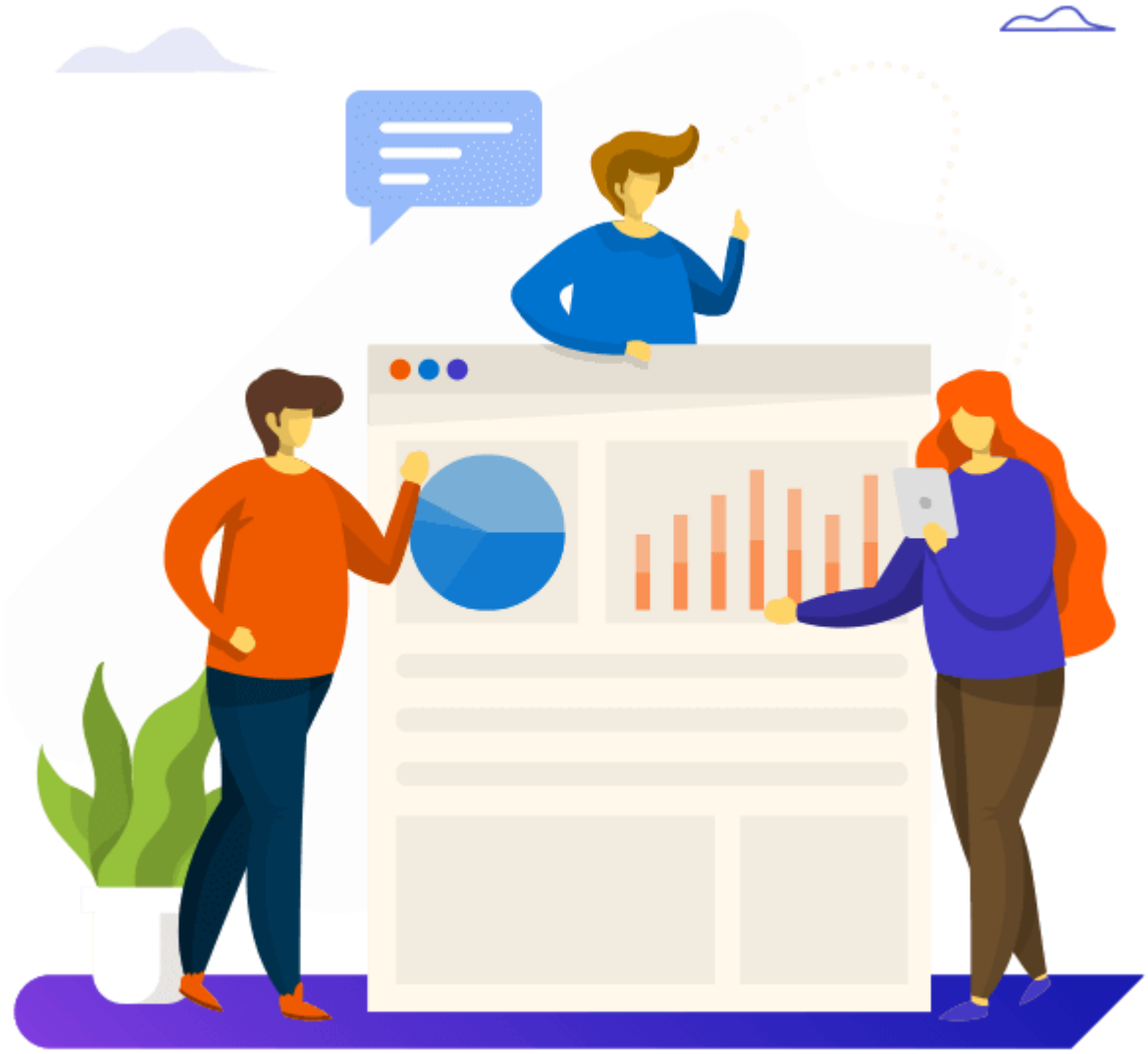

PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA

SECARA BERKALA BERJENJANG

TAHUN 2025

DINAS SOSAL

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kinerja Sasaran Strategis Dinas

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Dinas Sosial



Kinerja Anggaran Dinas

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Dinas Sosial



Kode	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)												Realisasi (%)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
[illegible]																
	Program															
	[illegible]	[illegible]								[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
	[illegible]	[illegible]					[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kinerja Sasaran Strategis Dinas

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sekretariat Dinas



Kinerja Anggaran Dinas

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sekretariat Dinas



Pagu	Program / Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)													Realisasi (%)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Sekretaris Dinas															
	Program :														
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota														
	Kegiatan :														
	Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	Administasi Keuangan Perangkat Daerah														
	Administasi Umum Perangkat Daerah														
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														

Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dan Fakir Miskin

Pengukuran Kinerja | Pengukuran Anggaran | Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 45,00%	50 - 59,99%	60 - 74,99%	75 - 85,99%	90 - 95,99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%

Perjabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dan Fakir Miskin																		
	Sasaran Program :																	
	Optimalnya Layanan perlindungan sosial korban bencana																	
		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau, Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	persen	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100,00
	Sasaran Kegiatan :																	
	Terselenggaranya Perlindungan Sosial yang Responsif bag Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Pidie																	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan 3+1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Pidie	orang	70	4	28	5	4	4	2	3	3	2	11	4	6	72	100,00

Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dan Fakir Miskin



Pengukuran Kinerja | Pengukuran Anggaran | Kendala dan Sinusi

0 - 34,99%	35 - 49,99%	50 - 74,99%	75 - 94,99%	95 - 100%

Pejabat	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Realisasi (%)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dan Fakir Miskin																
	Program :															
	Penanganan Bencana	229.000.000					47.084.000		54.000.000			66.854.500	18.575.000	20.597.200	208.020.300	94,52
	Kegiatan :															
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Kota	229.000.000					47.084.000		54.000.000			66.854.500	18.575.000	20.597.200	208.020.300	94,52

Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pekerja Sosial 1



Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pekerja Sosial 2



Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pekerja Sosial 2

Pengukuran Kinerja | Pengukuran Anggaran | Kendala dan Solusi



0 - 24.99%	25 - 49.99%	50 - 74.99%	75 - 94.99%	95 - 100%

Pejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Realisasi (%)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Pekerja Sosial 2																
	Kegiatan :															
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Kota	220.000.000					47.884.000	54.900.000				66.854.500	10.575.000	20.597.200	200.820.300	94.92
	Sub-Kegiatan :															
	Penyediaan Makanan	220.000.000					47.884.000	54.900.000				66.854.500	10.575.000	20.597.200	200.820.300	94.92

Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pengukuran Kinerja | Pengukuran Anggaran | Kendala dan Solusi

Belum Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 79.99%	80 - 94.99%	95 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%

Program	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Capaian(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial																		
	Sasaran Program :																	
	Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial bagi Lansia Usia, Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar serta Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya akan HIV/AIDS dan NAPZA yang layanan kebutuhan dasarnya																	
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	jenis	23.02	0	0	0	0	0	0	0	0	23.02	0	0	0	23.02	100.00
		Persentase lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	jenis	39.01	0	0	0	0	0	0	0	0	39.01	0	0	0	39.01	100.00
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	jenis	27.9	0	0	0	0	0	0	0	0	27.9	0	0	0	27.9	100.00
	Sasaran Kegiatan :																	
	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosialnya																	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	100.00
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Rukun Kurban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	60	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60	100.00

Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Bidang Rehabilitasi Sosial



Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pekerja Sosial 1



Jenjabat	Sasaran Kegiatan / Aksi Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Pekerja Sosial 1																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial bag. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti untuk Meningkatkan Kesetiagunan Sosialnya																	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	139	0	1	0	3	3	0	0	0	130	2	0	0	139	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :																
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota																
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	139	0	1	0	3	3	0	0	0	130	2	0	0	139	100.00

Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pekerja Sosial 1



Pengukuran Kinerja | Pengukuran Anggaran | Kendala dan Solusi

0 - 24,99%	25 - 49,99%	50 - 74,99%	75 - 94,99%	95 - 100%

Prejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Realisasi(%)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Pekerja Sosial 1																
	Kegiatan :															
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	291,241,000							11,852,000	30,390,166	191,979,239	9,950,000	17,453,052		261,631,161	89,84
	Sub-Kegiatan :															
	Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	291,241,000							11,852,000	30,390,166	191,979,239	9,950,000	17,453,052	13,745,000	275,376,901	94,55

Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pekerja Sosial 2



Program	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Jumlah	Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Pekerja Sosial 2																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti untuk Meningkatkan Kelberfungsian Sosialnya																	
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	60	1	0	3	3	1	0	0	50	1	3	0	1	0	50	500,00
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	60	1	0	3	3	1	0	0	50	1	3	0	1	0	50	500,00

Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pekerja Sosial 2

Pengukuran Kinerja | Pengukuran Anggaran | Kendala dan Solusi



0 - 24.99%	25 - 49.99%	50 - 74.99%	75 - 94.99%	95 - 100%

Pejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Realisasi(%)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Pekerja Sosial 2																
	Kegiatan :															
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lansia bakan Kaban HIV AIDS dan NAPZA diluar Panti	57,670,200							1,226,640	11,662,200	20,408,600	2,570,000	17,417,520		53,465,380	97.25
	Sub-Kegiatan :															
	Pembelian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	57,670,200							1,226,640	11,662,200	20,408,600	2,570,000	17,417,520	4,105,000	57,550,380	99.97

Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

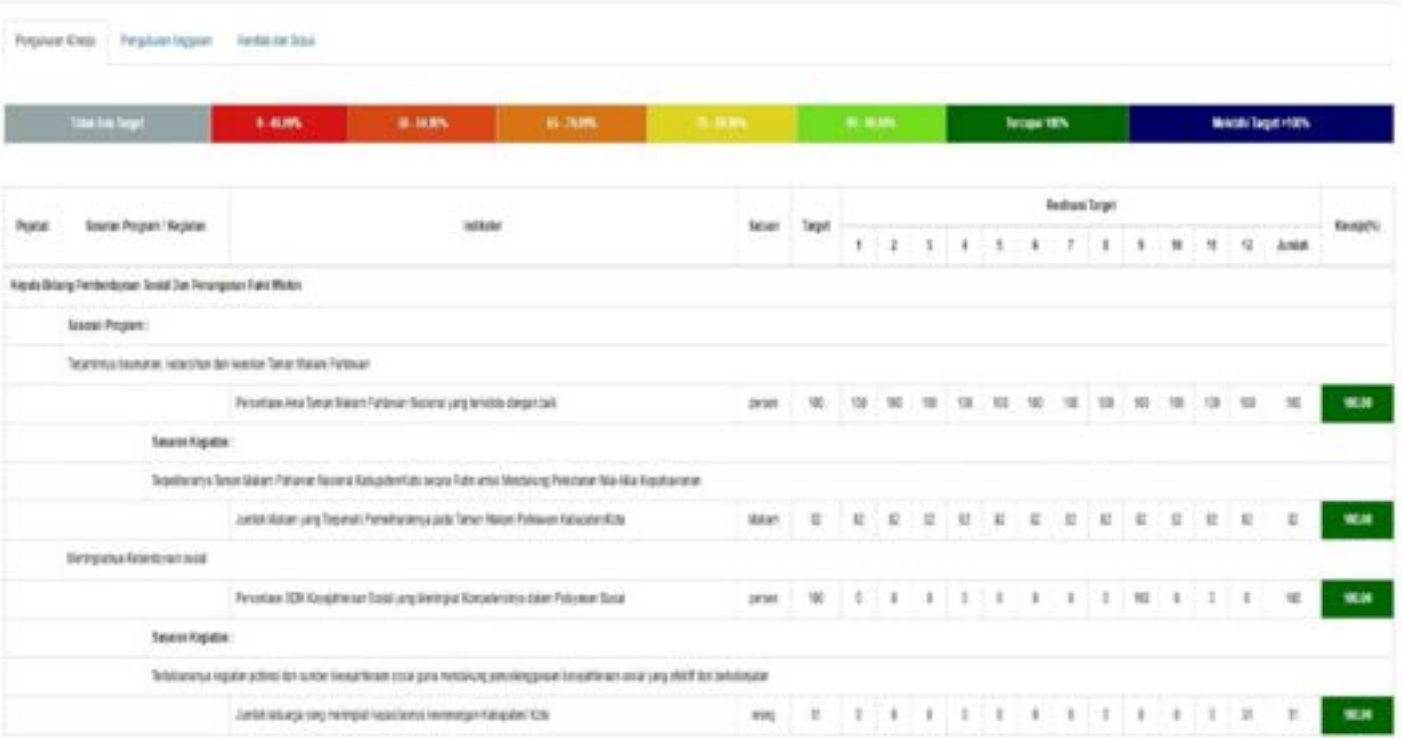

Pengukuran Kinerja | Pengukuran Keggiatan | Kendali dan Sebab

Tidak Ada Target	0 - 40,00%	40 - 54,00%	55 - 79,00%	79 - 89,00%	90 - 99,00%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%

Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin																		
	Sasaran Program :																	
	Terjaminnya kesemarakan, kebersihan dan keasrian Taman Makam Pahlawan																	
		Persentase Area Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
	Sasaran Kegiatan :																	
	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota secara Rutin untuk Mendukung Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan																	
		Jumlah Makam yang Terjamah Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	100,00
	Meningkatnya Kesejahteraan sosial																	
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	persen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	100,00
	Sasaran Kegiatan :																	
	Terbelasannya kegiatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial guna mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang efektif dan berkelanjutan																	
		Jumlah keluarga yang meningkat kepasitasnya kemenengan Kabupaten/Kota	orang	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	100,00

Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

Pengukuran Kinerja | Pengukuran Anggaran | Kendala dan Solusi

0 - 24,99%	25 - 49,99%	50 - 74,99%	75 - 94,99%	95 - 100%



Pejabat	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Realisasi(%)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin																
	Program :															
	Pemberdayaan Sosial	210.282.000								17.783.000			85.644.784	114.643.973	215.082.300	100,00
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	89.773.000							47.715.000	10.162.000				31.688.839	89.761.500	99,99
	Kegiatan :															
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	89.773.000							47.715.000	10.162.000				31.688.839	89.761.500	99,99

Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pekerja Sosial



Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pekerja Sosial



Polewali, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Sosial

[redacted] JASIN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730711 199203 1 001